

DINAMIKA WACANA MULTIKULTUR DALAM FILM INDONESIA

(Analisis Wacana Kritis Film Indonesia dengan Isu Minoritas Pasca 1998)

Oleh :

Filosa Gita Sukmono

NPM : 210130140003

USULAN PENELITIAN DISERTASI

Untuk diajukan dalam seminar usulan penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan Disertasi guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Komunikasi



PROGRAM DOKTOR ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG

2016

DINAMIKA WACANA MULTIKULTUR DALAM FILM INDONESIA

(Analisis Wacana Kritis Film Indonesia dengan Isu Minoritas Pasca 1998)

Oleh :

Filosa Gita Sukmono

NPM : 210130140003

USULAN PENELITIAN DISERTASI

Untuk diajukan dalam seminar usulan penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan Disertasi guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Komunikasi

| No | Nama Pembahas | Tanda Tangan |
|----|---------------------|--|
| 1. | Prof. Daddy Mulyana |  |
| 2. | Dr. Aceng Abdillah |  |
| 3. | Yulianskre Darwis |  |



PROGRAM DOKTOR ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU KOMUNIKASI

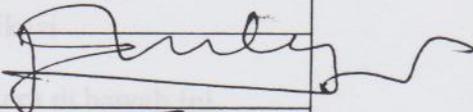
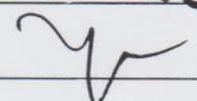
UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG

2016

REVISI
(LEMBAR PERSETUJUAN PERBAIKAN)
SEMINAR USULAN PENELITIAN PROGRAM DOKTOR (S3)

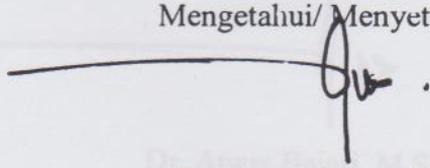
Nama : Filosa Gita Sukmono
NPM : 210130140003
Tanggal SUP : 06 April 2016
Bidang Ilmu : Ilmu Komunikasi
Judul SUP : Dinamika Wacana Multikultur dalam Film Indonesia
(Analisis Wacana Kritis Film Indonesia dengan Isu Minoritas Pasca 1998)

Telah direvisi, disetujui oleh Pembahas/Penelaah, Tim Promotor dan diperkenankan untuk melanjutkan ke lapangan.

| No | Nama Pembahas | Tanda Tangan |
|----|--------------------------------|---|
| 1. | Prof. Deddy Mulyana, M.A, Ph.D | 1.  |
| 2. | Dr. Aceng Abdullah, M.Si | 2.  |
| 3. | Yuliandre Darwis, Ph.D | 3.  |

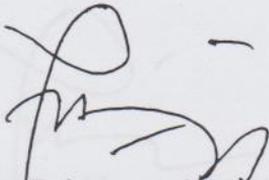
Bandung, 18 April 2016

Mengetahui/ Menyetujui,

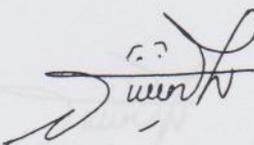


Dr. Atwar Bajari, M.Si

Ketua Promotor


Dr. Eni Maryani, M.Si

Anggota Promotor



Dr. Herlina Agustin, M.Si

Anggota Promotor

DINAMIKA WACANA MULTIKULTUR DALAM FILM INDONESIA

(Analisis Wacana Kritis Film Indonesia dengan Isu Minoritas Pasca 1998)

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Kelompok Sampul | 1 |
| Daftar-Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.1.1 Fokus Penelitian | 9 |
| 1.1.2 Pertanyaan Penelitian | 10 |
| 1.1.3 Tujuan Penelitian | 10 |
| 1.1.4 Manfaat Penelitian | 11 |
| 1.2 Kajian Literatur | 12 |
| 1.2.1 Penelitian | 12 |
| 1.2.2 Kerangka Teori | 21 |
| 1.2.2.1 Teori Semiotik Sebagai Dasar Kajian Film | 24 |
| 1.2.2.2 Teori Wacana Kritis | 24 |
| 1.2.2.3 Teori Minoritas | 24 |
| 1.2.3 Kerangka Konseptual | 31 |
| 1.2.3.1 Film Sebagai Teks Sosial dan Budaya | 31 |
| 1.2.3.2 Masyarakat Minoritas | 35 |
| 1.2.3.3 Hak Asasi Manusia Minoritas | 42 |
| 1.3 Metodologi Penelitian | 46 |
| 1.3.1 Paradigma Penelitian | 46 |
| 1.3.2 Subjek Penelitian | 49 |
| 1.3.3 Metode Penelitian | 50 |
| 1.3.3.1 Jenis Penelitian | 50 |
| 1.3.3.2 Teknik Pengumpulan Data | 50 |
| 1.3.3.3 Teknik Analisis Data | 51 |
| 1.3.3.4 Teknik Keabsahan Data | 54 |

Oleh :

Filosa Gita Sukmono

NPM : 210130140003

USULAN PENELITIAN DISERTASI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

guna memperoleh gelar Doktor Ilmu Komunikasi

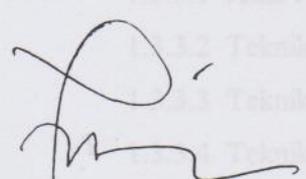
telah disetujui oleh tim promotor pada tanggal seperti tertera di bawah ini

Bandung, 22 Maret 2016

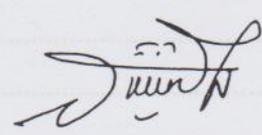
Menyetujui,



Dr. Atwar Bajari, M.Si
Ketua Tim Promotor



Dr. Eni Maryani, M.Si
Anggota Tim Promotor



Dr. Herlina Agustin, MT
Anggota Tim Promotor

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Halaman Sampul | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang Penelitian | 1 |
| 1.1.1 Fokus Penelitian..... | 9 |
| 1.1.2 Pertanyaan Penelitian | 10 |
| 1.1.3 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 1.1.4 Manfaat Penelitian..... | 11 |
| 1.2 Kajian Literatur | 12 |
| 1.2.1 Penelitian Terdahulu | 12 |
| 1.2.2 Kerangka Teoritis | 21 |
| 1.2.2.1 Teori Semiotik Sebagai Dasar Kajian Film | 21 |
| 1.2.2.2 Teori Kritis Sebagai Teori Emansipatoris | 25 |
| 1.2.2.3 Teori Wacana Norman Fairclough | 29 |
| 1.2.3 Kerangka Konseptual | 31 |
| 1.2.3.1 Film Sebagai Teks Sosial dan Budaya | 31 |
| 1.2.3.2 Masyarakat Multikultur dan Multikulturalisme | 35 |
| 1.2.3.3 Hak Asasi Manusia dan Hak Kelompok Minoritas | 42 |
| 1.3 Metodologi Penelitian | 46 |
| 1.3.1 Paradigma Penelitian | 46 |
| 1.3.2 Subjek Penelitian | 49 |
| 1.3.3 Metode Penelitian | 50 |
| 1.3.3.1 Jenis Penelitian | 50 |
| 1.3.3.2 Teknik Pengumpulan Data | 50 |
| 1.3.3.3 Teknik Analisis Data | 51 |
| 1.3.3.4 Teknik Keabsahan Data | 54 |
| Daftar Pustaka | 55 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|-------|----|
| Gambar 1.1 | | 4 |
| Tabel 1.1 | | 4 |
| Tabel 1.2 | | 15 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|------------|-------|----|
| Gambar 1.1 | | 47 |
| Gambar 1.2 | | 51 |

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan sebuah fakta yang tidak bisa diabaikan. Wilayah Indonesia yang membentang dari Aceh hingga Papua mempunyai banyak tidak hanya wilayah ataupun provinsi saja yang beragam tetapi budaya, suku, ras dan agama pastinya beragam. Sehingga paham bangsa meletakkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan sekaligus salah satu dasar bangsa ini, agar keberagaman tersebut tidak menyebabkan perpecahan tetapi justru semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bhineka Tunggal Ika sendiri bisa diartikan adalah sebagai pemertama, dalam artian golongan mayoritas bisa tetap menjalankan aktivitasnya, sedangkan golongan minoritas juga dengan senang beraktivitas tanpa ada tekanan dari golongan mayoritas. Sehingga antara golongan minoritas dan mayoritas bisa hidup berdampingan dengan tenang.

Inisiatif dalam beberapa tahun ini justru konflik antar suku, ras, agama sering mewarnai bangsa ini. Sehingga keberagaman yang sudah terdapat dengan baik justru memunculkan pertentangan di kalangan masyarakat, apakah keberagaman tersebut hanya menjadi simbol negara atau sudah dimaknai dengan baik oleh seluruh elemen bangsa ini?

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Keberagaman masyarakat Indonesia merupakan sebuah fakta yang tidak bisa ditawar. Wilayah Indonesia yang membentang dari Aceh hingga Papua memperjelas bahwa tidak hanya wilayah ataupun propinsi saja yang beragam tetapi budaya, suku, ras dan agama pastinya beragam. Sehingga pendiri bangsa meletakkan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan sekaligus salah satu dasar bangsa ini, agar keberagaman tersebut tidak menyebabkan perpecahan tetapi justru semakin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Bhineka Tunggal Ika sendiri bila dimaknai adalah sebagai pemersatu, dalam artian golongan mayoritas bisa tetap menjalankan aktivitasnya, sedangkan golongan minoritas juga dengan tenang beraktivitas tanpa ada tekanan dari golongan mayoritas. Sehingga antara golongan minoritas dan mayoritas bisa hidup berdampingan dengan tenang.

Ironisnya dalam beberapa tahun ini justru konflik antar suku, ras, agama sering mewarnai bangsa ini. Sehingga keberagaman yang sudah terbangun dengan baik justru menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat, apakah keberagaman tersebut hanya menjadi simbol negara atau sudah dimaknai dengan baik oleh seluruh elemen bangsa ini?

Kompleksnya permasalahan masyarakat multikultur di Indonesia justru menjadi daya tarik tersendiri bagi industri media. Salah satunya adalah industri film Indonesia yang sering mengambil berbagai isu terkait kompleksnya permasalahan masyarakat yang beragam ini dalam sebuah film.

Film sendiri jika kita pahami menurut Undang-Undang Perfilman No 33 tahun 2009 adalah karya seni budaya yang terwujud berdasarkan kaidah sinematografi merupakan fenomena kebudayaan. Hal itu bermakna bahwa film merupakan hasil proses kreatif warga negara yang dilakukan dengan memadukan keindahan, kecanggihan teknologi, serta sistem nilai, gagasan, norma dan tindakan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Film sebagai karya seni budaya yang dapat dipertunjukkan dengan atau tanpa suara juga bermakna bahwa film merupakan media komunikasi massa yang membawa pesan yang berisi gagasan penting kepada publik (khalayak) dengan daya pengaruh yang besar.

Posisi film dalam sebuah bangsa sebenarnya cukup penting, karena posisinya sebagai sebuah alat pemersatu sekaligus sebagai media untuk menunjukkan dan mempromosikan keberagaman bangsa, namun tak jarang pula dari sebuah film justru memicu permasalahan, menimbulkan konflik sampai perbedaan pandangan antar golongan.

Sebenarnya jika kita merujuk pada Mukadimah Anggaran Dasar Film dan Televisi, yang menjelaskan bahwa film mempunyai fungsi yang sangat mulia, yaitu film dan televisi bukan semata-mata barang dagangan, tetapi merupakan alat pendidikan dan penerangan yang mempunyai daya pengaruh yang besar sekali atas masyarakat, sebagai alat revolusi dapat menyumbang dharma baktinya dalam mengundang kesatuan dan persatuan nasional, membina *nation character building* mencapai masyarakat sosialis berdasarkan pancasila (dalam Imanjaya, 2006 : 28).

Hal ini dipertegas oleh Ron Mottram, ada tiga fungsi yang paling penting dari semua film yakni, fungsi artistik, industrial dan komunikatif. Sebagai seni, sejumlah film punya struktur narasi, karena ia menghadirkan suatu rangkaian peristiwa yang saling berkaitan secara kausal yang membantu mengonstruksi sebuah kisah. Yang lainnya, adalah non-narasi yang mengorganisasikan materinya untuk fungsi-fungsi yang bersifat informasional, retorik atau murni estetika. Sebagai industri, film adalah sesuatu yang merupakan bagian dari produksi ekonomi suatu masyarakat dan ia mesti dipandang dalam hubungannya dengan produk-produk lainnya. Sebagai komunikasi film merupakan bagian penting dari sistem yang digunakan oleh para individu dan kelompok untuk mengirim dan menerima pesan (Ibrahim, 2011 : 190).

Berbicara problematika film indonesia memang cukup menarik, mulai dari posisinya yang penting dalam perkembangan sebuah bangsa, sampai fungsi-fungsi sebuah film yang bisa mencakup berbagai dimensi dalam kehidupan. Perkembangan film indonesia sendiri sudah mulai menggeliat sejak tahun 1926

dengan film pertamanya berjudul Loetoeng Kasaroeng, yang kemudian berkembang hingga ribuan film hingga saat ini. Meskipun dalam perkembangannya ada di beberapa perodesasi mengalami naik turun jumlah produksi film, seperti ditahun 1945-1947 tidak ada produksi film atau tahun 1998-1999 jumlah produksi film yang minim, berikut peneliti tampilkan data perkembangan film indonesia :

Tabel 1.1 Jumlah Film dari Periode ke Periode

| No | Periode Waktu | Jumlah Film | Keterangan |
|----|---------------|-------------|---|
| 1 | 1926-1936 | 37 | |
| 2 | 1937-1947 | 66 | 1945-1947 tidak ada produksi film |
| 3 | 1948-1958 | 362 | |
| 4 | 1959-1969 | 201 | |
| 5 | 1970-1980 | 716 | |
| 6 | 1981-1991 | 851 | |
| 7 | 1992-2002 | 212 | Tahun 1998-1999 produksi film hanya mencapai 4 film |
| 8 | 2003-2013 | 766 | Dalam rentang waktu ini produksi film paling minim pada tahun 2003 yaitu 13 film. |
| 10 | 2014-2015 | 231 | |
| | Total | 3442 | |

Sumber : 1926 -2007 data diolah dari buku Katalog Film Indonesia dan 2008-2015 data diolah dari website filmindonesia.or.id

Data perkembangan film indonesia jika dilihat kecenderungannya mengalami naik turun, namun kecenderungannya setelah mengalami penurunan maka perlahan akan mengalami peningkatan dan perubahan yang

cukup menonjol. Momentum 1998 adalah salah satu titik yang patut dicermati, setelah di rezim orde baru media massa termasuk film mengalami “penekanan” oleh pemerintah, namun setelah itu pertumbuhan film perlahan mengalami peningkatan yang cukup baik.

Momentum tersebut juga dijelaskan oleh JB Kristanto bahwa tahun 1990an dikesankan oleh orang-orang film sendiri maupun –waktu itu– Departemen Penerangan yang membawa urusan perfilman, bahwa ada kelesuan produksi film nasional. Tanpa melakukan pemeriksaan lagi keadaan sebenarnya, pers pun mengikuti mangamini. Bahkan sampai tahun 2000an, tidak sedikit pers yang menyatakan dengan yakin bahwa periode setelah pertengahan 1990an sampai awal 2000an adalah periode mati suri film nasional (Kristanto, 2007 : ix).

Kesan itu rasanya jauh dari kenyataan kalau hanya melihat jumlah produksi film. Beberapa data menunjukkan bahwa tahun 1994 terdapat 26 judul film yang diproduksi, 1995:22 film, 1996:34 film, dan 1997: 32 film. Tahun 1997 adalah awal krisis ekonomi yang berlanjut dengan krisis sosial politik dan berujung pada jatuhnya Soeharto sebagai presiden dan mulainya zaman yang lebih “Demokratis”, meski kebiasaan-kebiasaan dari zaman sebelumnya masih terus berlanjut seperti korupsi. Akibatnya sangat terasa pada dunia produksi film, karena produksi tahun 1998 dan 1999 hanya 4 film. Tahun 2000, naik menjadi 11 film dan tahun berikutnya, 2001 turun lagi menjadi 3 film. Mulai tahun 2002, produksi film nasional bangkit menjadi 14 film; 2003: 15 film, 2004: 31 film (Kristanto, 2007: xxi).

Kebangkitan film Indonesia pasca 1998, juga disertai munculnya beberapa film yang menarik perhatian dengan mengangkat tema multikultur dengan isu kelompok minoritas yang di dalamnya menekankan bagaimana perjuangan kelompok minoritas dalam menghadapi dan berjuang di tengah masyarakat yang multikultur di Indonesia.

Peneliti mencatat pasca 1998 setidaknya terdapat 3 film yang cukup populer dan menonjol di masyarakat yang mengangkat tema multikultur dengan isu minoritas, antara lain, *Soe Hok Gie* (2004), *Tanda Tanya* (2011), dan *Soegija* (2012).

Sebelum mengambil ketiga film tersebut peneliti melakukan pendataan terkait film-film bertema multikultur sejak tahun 1998 sampai 2015, dan peneliti menemukan 67 film dengan tema multikultur. Tiga film yang sudah dipilih adalah tiga film yang secara tema dan isu cukup menonjol, baik dari aspek multikulturalisme ataupun isu-isu minoritas di dalamnya.

Film multikultur dengan isu minoritas yang dimaksud oleh peneliti adalah film yang di dalamnya mengangkat keberagaman yaitu dalam film tersebut tidak hanya menampilkan satu budaya saja tapi beberapa budaya yang ditampilkan, selain itu juga menampilkan bagaimana perjuangan kelompok minoritas di dalamnya.

Sebagai gambaran awal peneliti akan mereview secara singkat 3 film di atas, Film pertama adalah film *Soe Hoek Gie*, film yang beredar di tahun 2004 ini disutradarai oleh Riri Reza dan diproduksi oleh Mira Lesmana. Film ini mengkisahkan tentang perjuangan Gie dalam melawan ketidakbenaran dan

ketidakberesan di zamannya, perjuangan Gie sebagai etnis Tionghoa semakin berat ketika satu persatu orang terdekat meninggalkannya termasuk perempuan yang dekat dengan Gie. Film ini tergolong fenomenal karena di tahun 2005 memborong 11 penghargaan sekaligus dalam Festival Film Indonesia. Melalui film ini peneliti ingin melihat bagaimana wacana perjuangan etnis tionghoa di tengah masyarakat yang multikultural.

Film kedua dalam penelitian ini adalah *Tanda Tanya*, film garapan Hanung Bramantyo tahun 2011 ini tidak hanya menarik namun cukup menimbulkan kontroversi, hal ini dibuktikan dengan salah satu ormas yang tiba-tiba memboikot pemutaran film tersebut. Di balik kontroversinya, film ini mampu meraih 11 penghargaan salah satu-nya tahun 2011 di Festival Film Indonesia meraih penghargaan sebagai pengarah sinematografi terbaik. Film ini benar-benar menceritakan permasalahan multikulturalisme di Indonesia, mulai dari gesekan antar agama sampai gesekan antar etnis.

Film ketiga adalah *Soegija*, film yang disutradarai oleh Garin Nugroho ini beredar di tahun 2012. Film ini menceritakan perjuangan Soegija yang juga seorang uskup dalam melawan penjajah. Film yang banyak menuai kritik dan kontroversi di dalam negeri ini justru mendapatkan apresiasi yang luar biasa di luar negeri, yaitu dengan mendapatkan penghargaan sebagai film terbaik dalam Festival Film Niepokalanov-Polandia pada tahun 2013, selain itu juga mendapatkan penghargaan dari Muri (Museum Rekor Indonesia) sebagai film dengan penggunaan bahasa terbanyak pada tahun 2012. Melalui film ini peneliti ingin melihat bagaimana perjuangan seorang pejuang non-muslim

dalam melawan penjajah di era kemerdekaan dengan balutan keberagaman dan kebersamaan.

Melihat ketiga film Indonesia pasca 1998 itu hampir semuanya menonjolkan isu minoritas, kemudian pasti timbul pertanyaan, mengapa untuk melihat wacana multikultur peneliti fokus kepada film-film tentang isu minoritas? karena multikulturalisme bisa berjalan dengan baik dalam masyarakat multikultur jika adanya politik pengakuan (*a politics of recognition*) kepada kelompok-kelompok minoritas. Sehingga peneliti meyakini bahwa untuk melihat bagaimana dinamika wacana multikultur dalam film Indonesia pasca 1998 adalah dengan menganalisis film-film dengan tema multikultur yang menonjolkan isu minoritas di dalamnya.

Kondisi pasca 1998 sendiri oleh Ariel Heryanto digambarkan sebagai sebuah momentum dimana kejatuhan pemerintahan sentralistis orde baru yang sempat bertahan selama tiga dekade, serta dampak berkepanjangan krisis ekonomi 1997, telah mengantar masyarakat pada sebuah masa yang membingungkan. Masa pasca otoritarian ini menciptakan kekosongan kuasa politik yang menganga besar, melepas kekang bagi proses liberalisasi (Haryanto, 2015 :79).

Kemudian rentan waktu pasca 1998 yang dipilih karena banyak penggiat film mengatakan perodesasi tersebut adalah awal masa transisi film Indonesia sekaligus memasuki masa produktif film Indonesia. Peneliti mencatat lebih dari 1000 film sudah muncul pasca 1998, hal ini diperkuat penjelasan Garin Nugroho bahwa pasca 1998 akan muncul generasi baru perfilman Indonesia,

periode 1998 dipuncaki jatuhnya Soeharto dan ditandai lahirnya generasi baru dalam situasi sosial politik yang mengalami transisi (Nugroho dan Herlina, 2015 : 248). Sehingga nantinya akan banyak hal yang dapat ditemukan dalam penelitian ini, karena peneliti akan mengamati sekaligus menganalisis dinamika wacana multikultur film Indonesia dalam perodesasi masa transisi sampai masa produktif

1.1.1 Fokus Penelitian

Motivasi awal yang menggerakkan penelitian ini adalah banyak bermuncullannya film-film bertema multikultur pasca 1998, peneliti mencatat ada 67 film bertemakan multikultur dari tahun 1998 sampai 2015. Kemudian dari sekian banyak film multikultur tersebut peneliti menemukan tiga film yang mengangkat tema multikultur dengan isu minoritas yang cukup menyita perhatian publik, hal ini terlihat dari jumlah penghargaan maupun pemberitaan di media massa. Sehingga peneliti ingin melihat bagaimana dinamika wacana multikultur dengan isu minoritas pasca 1998 lewat tiga film yang sudah peneliti tentukan.

Oleh karena itu penelitian ini bisa ditarik sebuah fokus penelitian yaitu :
Bagaimanakah dinamika wacana multikultur dalam film Indonesia dengan isu minoritas pasca 1998 ?

1.1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang sudah disusun maka muncullah lima pertanyaan penelitian antara lain :

- Bagaimana wacana sebagai praktik sosial budaya dalam film Gie ?
- Bagaimana wacana sebagai praktik sosial budaya dalam film Tanda Tanya?
- Bagaimana wacana sebagai praktik sosial budaya dalam film Soegija?
- Bagaimana pergerakan wacana multikultur dengan isu minoritas dalam tiga film Indonesia pasca 1998?

1.1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana wacana sebagai praktik sosial budaya dalam film Gie.
2. Untuk mengetahui bagaimana wacana sebagai praktik sosial budaya dalam film Tanda Tanya.
3. Untuk mengetahui bagaimana wacana sebagai praktik sosial budaya dalam film Soegija.
4. Untuk mengetahui bagaimana pergerakan wacana multikultur dengan isu minoritas dalam tiga film Indonesia pasca 1998.

1.1.4 Manfaat penelitian

Berdasarkan latar belakang dan tujuan penelitian, maka diharapkan penelitian ini mempunyai manfaat penelitian yaitu :

1. Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian film dalam lingkup ilmu komunikasi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian multikultur dalam lingkup ilmu komunikasi.
3. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kajian teks dalam lingkup ilmu komunikasi.

2. Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para pelaku dunia perfilman Indonesia bahwa terkadang semangat mereka untuk menampilkan wacana multikultur justru terjebak dalam berbagai hal yang tidak mereka bayangkan sebelumnya.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan bisa membangun kesadaran di masyarakat terhadap praktik-praktik dominasi budaya tertentu dalam film.
- 3) Penelitian ini juga diharapkan bisa memetakan perkembangan film indonesia dalam ranah wacana multikultur.

1.2 Kajian Literatur

1.2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang sudah sampai pada publikasi penulis rangkum untuk melengkapi penelitian ini, yang nantinya berfungsi sebagai salah satu pendorong peneliti untuk mengisi kekosongan penelitian yang belum dilakukan oleh peneliti lain, ataupun menjadi sebuah peta dalam jalannya penelitian ini.

Pertama, penelitian dari Yoav Hammer yang dipublikasikan dalam *Jurnal of Law and Ethics of Human Rights*, vol 1 no 169 tahun 2007 dengan judul *Multiculturalism and The Mass Media*. Hammer menjelaskan bahwa hak kebebasan, identitas dan kelompok minoritas perlu diperhatikan saat ini. Hal ini juga sering ditunjang dengan ketidakberuntungan dari kelompok minoritas dalam momen-momen tertentu. Sehingga negara perlu memperhatikan.

Penelitian ini pada intinya ingin mendorong negara lewat media massa untuk lebih memperhatikan multikulturalisme khususnya kelompok minoritas, selain itu memberikan ruang yang sama kepada kelompok-kelompok minoritas agar wacana yang mereka usung sama di depan publik.

Kedua, penelitian dari Jeffry G. Reitz, Raymond Breton, Karen K Dion, Kanneth K Dion yang dipublikasikan dalam sebuah buku *Multiculturalism and Social Cohesion : Potential and Challanges of Diversity*. Penelitian ini diawali dari sebuah pertanyaan besar, apakah multikulturalisme bisa bekerja, kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan apakah multikulturalisme menciptakan kohesi sosial atau justru merusaknya. Penelitian ini dilakukan di Kanada pada tahun 2002 dengan metode survey dengan melibatkan 41.000 responden, penelitian

ini ingin melihat secara kompleks antara kohesi sosial dengan multikulturalisme. Penelitian ini berangkat dari sebuah asumsi bahwa kaum minoritas mempunyai hubungan yang rumit jika bersosialisasi dengan kelompok lain, sehingga kebijakan tentang keberagaman di Kanada apakah menciptakan integrasi sosial atau sebaliknya.

Ketiga, Penelitian dari Amber Y Wang dengan judul *Multiculturalism in the College English Curriculum*, yang diterbitkan pada jurnal *Multicultural, Gender and Minority Studies* Vol 3 Issue 1 2009. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dari sudut pandang siswa, bagaimana multikulturalisme tercermin dalam kurikulum saat ini, khususnya pada mata kuliah atau kelas-kelas bahasa Inggris. Melalui penelitian survey, peneliti meneliti bagaimana rencana kurikulum sampai proses implementasinya beserta sikap dan kepuasan mereka terhadap kurikulum tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keragaman membaca teks dan strategi pengajaran yang telah ditekankan dalam kurikulum, tetapi pengajar atau instruktur punya peran dominan dalam terciptanya perpektif multikultur.

Keempat, penelitian dari Maria Nala Damayanti dengan judul *Perspektif Multikultur, Kasus Film 3 hati 2 Dunia Satu Cinta* yang diterbitkan dalam jurnal *Desain Komunikasi Visual Nirwana*, Vol 13 No 1 Januari 2011. Dalam penelitiannya Nala melihat isu multikultur di Indonesia adalah wacana baru dalam budaya yang penting sehubungan dengan banyak konflik SARA yang terjadi akhir-akhir ini. Film sebagai media audio visual punya peranan besar dalam mengkampanyekan ide tersebut. Oleh karena itu menganalisa film

dengan perspektif multikultur akan menjadi pandangan tersendiri yang mungkin dikembangkan dalam kaitannya dengan peranannya dalam kemajemukan budaya. Penelitian ini mengulas film '3 Hati 2 Dunia 1 Cinta' yang diluncurkan tahun 2010. Lewat analisis kajian sinema, dengan pendekatan teori multikulturalisme, terbuka tawaran bagi penonton untuk mengambil bagian dalam interpretasi. Secara khusus interpretasi atas praktek budaya yang tercermin melalui narasi film.

Kelima, penelitian dari Hendar Putranto dengan judul *Kesetaraan Jender dan Multikulturalisme : sebuah catatan dan refleksi untuk konteks Indonesia*, yang diterbitkan pada Jurnal Ultima Humaniora, Maret 2013 Vol 2 No 1. Dalam penelitiannya tersebut Hendra mencoba membahas debat seputar wacana multikulturalisme dan sejumlah definisinya, gesekan antara Multikulturalisme dengan agenda kaum feminis, relevansi diskusi tentang multikulturalisme untuk agenda pemajuan keadilan dan kesetaraan jender di Indonesia. Kemudian Hendra menyimpulkan bahwa Isu multikulturalisme, baik sebagai kerangka wacana maupun sebagai agenda praktis perjuangan politik, tidak perlu diperlawankan dengan agenda feminis yang berupaya untuk memajukan kesetaraan dan keadilan jender. Meskipun di sana-sini masih nampak adanya ketegangan konseptual dan praktis antara kedua isu besar ini, namun ada satu hal yang dilihat penulis bisa menjadi kerangka kerja bersama baik bagi kaum multikulturalis maupun bagi kaum feminis, yaitu: kesadaran akan keanekaragaman budaya, bangsa, kepentingan dan suara sekaligus pengakuan bahwa keanekaragaman itu bisa menyumbang pemahaman akan

realitas dan gugus tindakan kita menjadi lebih kaya dan kreatif hendaknya bisa menjadi titik pijak untuk menolak model-model homogenisasi, penyeragaman dan penindasan wajah baru yang dilancarkan oleh siapapun aktornya.

Keenam, penelitian dari Widya Yutanti dengan judul *Multikulturalisme dalam Wajah Komedi Situasi : Antara Kesederajatan dan Kesenjangan* yang diterbitkan pada Jurnal Komunikator Vol 3 No 1 Mei 2011. Dalam jurnal ini Widya mencoba menjelaskan bahwa acara-acara komedi situasi justru membahayakan pendidikan multikulturalisme itu sendiri, karena dalam setiap adegannya justru melakukan pelecehan terhadap etnis lain, yang semakin memperkuat stereotip negatif terhadap budaya tertentu. Dalam tulisannya Widya juga mencontohkan beberapa komedi situasi yang cukup populer seperti *Kejar Kurnadi*, *Parodi Jali-jali*, *OB (Office Boy)*, *Bajaj Bajuri Edisi Salon Oneng*, *Bajaj Bajuri Narik Lagi* dan *Petak 9* (Komedi Tionghoa).

Ketujuh, penelitian dari Ratna Noviani dengan judul *Konsep Diri Remaja dalam Film Indonesia : Analisis Wacana atas Film Remaja Indonesia tahun 1970-2000-an* yang diterbitkan dalam jurnal Kawistara, Volume 1 Nomer 1 Tahun 2011. Penelitian ini merupakan kajian teks film yang dianalisis dan diidentifikasi untuk mengetahui bagaimana konsep diri remaja dalam konteks masyarakat Indonesia dikonstruksi dan diwacanakan melalui citra dan narasi film. Dengan menggunakan analisis wacana Norman Fairclough, terhadap kedelapan film tersebut menunjukkan adanya persamaan modifikasi dan juga perbedaan konstruksi konsep diri remaja dari dekade ke dekade antara remaja baik-baik dan remaja nakal.

Kedelapan, penelitian dari Novi Kurnia dengan judul *Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman* yang diterbitkan pada Jurnal Ilmu Sosial dan Politik UGM, Volume 9 Nomer 3 Tahun 2006. Dalam kajiannya Novi menjelaskan tentang lambannya perkembangan industri film di Indonesia, untuk melihat berbagai permasalahan yang terkait dengan lambannya perkembangan film Indonesia, Novi menggunakan pendekatan ekonomi politik media. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lambannya pertumbuhan industri perfilman di Indonesia banyak dipengaruhi permainan relasi kuasa antara negara, pasar dan publik.

Kesembilan, Kajian dari Orizon Astonia dengan judul *Budaya Film Horor dalam Wajah Perfilman Indonesia* yang diterbitkan pada jurnal Imaji, Edisi 4, Nomer 1 tahun 2012. Dalam pembahasannya Orizon menjelaskan bagaimana posisi film horor dalam perfilman di Indonesia, pembahasan Orizon dimulai dari sejarah film horor di Indonesia sampai kajiannya tentang kualitas film Horor yang ada di Indonesia. Kesimpulan dari Orizon menunjukkan bahwa film Horor bukanlah media yang buruk namun cara penyampainnya harus lebih komperhensif dan perlu adanya analisa sebelum pembuatan film agar film yang ditampilkan tidak menjadi buruk.

Kesepuluh, Penelitian dari Akhmad Rizal Faizal dengan judul *Cult Film dan Analisa Semiotik Film pada Nagabonar Jadi 2*, diterbitkan pada jurnal Ilmu Komunikasi, Atma Jaya Yogyakarta, Volume 6 Nomer 1 tahun 2009. Penelitian ini ingin menunjukkan bagaimana fenomena cult film dalam perfilman Indonesia, dengan film yang dianalisa adalah Nagabonar Jadi 2,

kemudian metode yang digunakan adalah Semiotika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep cult film tidak dapat dipisahkan dari penggemarnya, selain itu dalam film Nagabonar 2 peneliti melihat bahwa film ini bukan bagian dari cult film.

Kesepuluh penelitian di atas menunjukkan bahwa permasalahan multikultur dalam masyarakat dan media begitu kompleks, dan dari kesepuluh penelitian tersebut peneliti menemukan celah yang belum disentuh oleh penelitian lainnya yaitu bagaimana dinamika wacana multikultur hadir dalam film Indonesia kemudian dengan analisis wacana kritis peneliti bisa mengetahui mulai aspek ideologi, konteks masyarakat, sampai wacana (teks media) itu sendiri. Keenam penelitian di atas beberapa fokus pada teks media saja ataupun permasalahan di masyarakat saja, dengan analisis wacana kritis kita bisa menjembatani dua hal tersebut sekaligus mampu melihat relasi kuasa di dalamnya.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

| Item Kajian | Nama Peneliti | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|
| | Yoav Hammer | Jeffrey G. Reitz dkk | Amber Y Wang | Maria Nala Damayanti | Hendar Putranto | Widya Yutanti | Ratna Noviani | Novi Kurnia | Orizon Astonia | Akhmad R. Faizal |
| Judul | <i>Multiculturalism and The Mass Media</i> | <i>Multiculturalism and Social Cohesion : Potential and Challenges of Diversity</i> | <i>Multiculturalism in the College English Curriculum</i> | <i>Perspektif Multikultur, Kasus Film 3 hati 2 Dunia Satu Cinta</i> | <i>Kesetaraan Jender dan Multikulturalisme : sebuah catatan dan refleksi untuk konteks Indonesia</i> | <i>Multikulturalisme dalam Wajah Komedinya Situasi : Antara Kesederajatan dan Kesenjangan</i> | <i>Konsep Diri Remaja dalam Film Indonesia : Analisis Wacana atas Film Remaja Indonesia tahun 1970-2000-an</i> | <i>Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman</i> | <i>Budaya Film Horor dalam Wajah Perfilman Indonesia</i> | <i>Cult Film dan Analisa Semiotik Film pada Nagabonar Jadi 2</i> |
| Tahun | 2007 | 2002 | 2009 | 2011 | 2013 | 2011 | 2011 | 2006 | 2012 | 2009 |
| Metode | Studi Pustaka | Survei | Survei | Kajian Sinema | Studi Pustaka | Analisis Wacana | Analisis Wacana | Ekonomi Politik Media | Studi Pustaka | Semiotik |
| Hasil Penelitian | Penelitian ini ingin mendorong negara lewat media massa | Multikulturalisme masih secara eksplisit mendukung adanya integrasi sosial | Penelitian ini menyimpulkan bahwa keragaman membaca teks dan strategi | Penelitian ini menunjukkan perayaan atas perbedaan. Budaya tetap cair, sehingga | Menyimpulkan bahwa Isu multikulturalisme, baik sebagai kerangka | Menyimpulkan penanaman kesadaran akan multikulturali | Menunjukkan adanya persamaan modifikasi dan juga perbedaan | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian lambannya | Menunjukkan bahwa film Horor bukanlah | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa an bahwa konsep |

| | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|---|--|---|---|--|---|--|
| untuk lebih memperhatikan an multikulturalisme khususnya kelompok minoritas, | | | | pengajaran yang telah ditekankan dalam kurikulum, tetapi pengajar atau instruktur punya peran dominan dalam terciptanya perpektif multikultur. | percampuran dan akulturasi bukan sebuah kesalahan, dan sejauh ini bukan sebuah pemaksaan. | wacana maupun sebagai agenda praktis perjuangan politik, tidak perlu diperlawankan dengan agenda feminis yang berupaya untuk memajukan kesetaraan dan keadilan jender. | some benar membawa semangat kesederajatan, bukan kesenjangan. | konstruksi konsep diri remaja dari dekade ke dekade antara remaja baik-baik dan remaja nakal. | pertumbuhan industri perfilman di Indonesia banyak dipengaruhi permainan relasi kuasa antara negara, pasar dan publik. | media yang buruk namun cara penyampainya, selain itu dalam film Nagabonar 2 peneliti melihat bahwa film ini bukan bagian dari cult film | cult film tidak dapat dipisahkan dari penggemar nya, selain itu dalam film Nagabonar 2 peneliti melihat bahwa film ini bukan bagian dari cult film |
| Kritik | Penelitian ini sebatas penelitian pustaka dan | Penelitian ini tidak melihat bagaimana proses | Penelitian ini seharusnya juga melibatkan | Penelitian ini sebatas penelitian pustaka, | Penelitian ini jauh lebih menarik jika melihat | Penelitian ini bisa semakin menarik | Penelitian ini perlu ditingkatkan ke | Penelitian ini jauh lebih baik jika | Penelitian ini bisa semakin menarik | Penelitian ini perlu ditingkatkan ke | Penelitian ini perlu menambahkan objek |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|--|--|------------------------|---|
| <p>konseptual, akan lebih menarik jika merujuk pada kasus tertentu.</p> | <p>interaksi kelompok minoritas di Kanada</p> | <p>orangtua siswa sebagai salah satu objek penelitian</p> | <p>menjadi penelitian teks untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam</p> | <p>temuan akan lebih menarik jika dikembangkan menjadi penelitian teks atau lapangan</p> | <p>periodisasi dari wacana multikultur dalam komedi situasi di Indonesia dari era ke era</p> | <p>dilengkapi dengan data sekunder seperti wawancara dengan kru dari film tersebut</p> | <p>jika dilengkapi wawancara dengan pelaku perfilman dan perwakilan negara sebagai pembuat regulator</p> | <p>penelitian teks</p> | <p>kajian sehingga jika satu film yang dianalisis bukan cult film maka film yang lain bisa menunjukkan an cult filmnya.</p> |
|---|---|---|--|--|--|--|--|------------------------|---|

1.2.2 Kerangka Teoritis

1.2.2.1 Teori Semiotika sebagai Dasar Kajian Film

Sebelum membahas tentang teori semiotika yang nantinya mengerucut pada teori semiotika Roland Barthes, peneliti ingin menjelaskan bahwa dalam kajian film memang tidak ada secara spesifik sebuah teori yang merujuk pada kajian film namun menurut Richard Rushton dan Gary Bettinson dalam buku *What is Film Theory* strukturalisme dan semiotik adalah pondasi dari teori film. Perdebatan tentang teori film dijelaskan oleh Rushton dan Bettinson sebagai berikut, salah satu poin menarik adalah sampai saat ini para pemikir dalam kajian film belum sepakat tentang satu teori yang sangat identik dengan kajian film.

'Film theory' is best thought of as a substantive field of inquiry in which are clustered a number of discrete theories of cinema. No one system of propositions governs the entire field - in other words, there is no single, monolithic 'film theory' that film scholars unanimously endorse. For a newcomer to the field, the nonexistence of a definitive theory of cinema can be frustrating. But we should keep in mind that the fields of the traditional arts - literature, painting, theatre, music - also house a range of theoretical perspectives, and the diversity of approaches enriches each tradition. Since the 1960s, film theory has fostered a diverse set of paradigms. Yet this is not cause for frustration. The jousting of theoretical approaches, the skirmishes among theorists, the flourishing of some theories and the decline of others - such undulations have pushed film studies into enlightening and fruitful areas of discovery. The lack of a 'master theory' of cinema, then, is not to the detriment of film theory. Knowledge springs from debate. Precisely what makes the field of film theory so fascinating - apart from the concrete emphases of the paradigms themselves - is the sheer range of theories that it encompasses, and the intellectual tussles that break out among them. What is Film Theory? bears

witness to the exhilarating heterogeneity of contemporary film theory ((Rushton & Bettinson, 2010: 1)

Kemudian Rushton dan Bettinson dalam bukunya juga menjelaskan tentang beberapa teori yang berkaitan dengan kajian film mulai dari teori representasi, feminisme sampai postkolonialisme, namun dasar dari teori film adalah teori strukturalisme dan semiotik.

Many writers on cinema who were active from the 1910s to the 1960s might be described as film theorists. However, a major turning point in film studies occurred in the 1960s under the influence of an intellectual movement broadly known as structuralism. Structuralism was a method for analysing the deep structuring logic of cultural products and practices. Everything from tribal kinship structures (Levi-Strauss 1977) to clothing fashions and advertising (Barthes 1972; 1983) could, for the structuralists, be subjected to structural analysis. Instead of trying to discover the intrinsic meanings of surface appearances, the structuralists were committed to unravelling the hidden relations beneath surface appearances which, so they argued, provided a more substantial - and more scientific - understanding of the ways in which cultural products and practices engender meaning (2010 :14)

Pada penelitian ini penulis mengkaji lebih khusus tentang semiotika dan lebih mengerucut lagi tentang semiotika Roland Barthes hal ini dikarenakan teori ini nantinya membantu peneliti untuk membongkar berbagai kode dan tanda budaya yang tersembunyi dalam film.

Semiotika adalah ilmu yang mengkaji tanda dalam kehidupan manusia. Artinya, semua yang hadir dalam kehidupan kita dilihat sebagai tanda, yakni sesuatu yang harus kita beri makna. Tanda dalam pandangan Ferdinand de Saussure dan para pengikutnya seperti Roland Barthes melihat tanda sebagai sesuatu yang menstruktur (proses pemaknaan berupa kaitan antara penanda dan

petanda) dan terstruktur (hasil proses tersebut) di dalam kognisi manusia (Hoed, 2011 :3).

Semiotika pada perkembangannya menjadi perangkat teori yang digunakan untuk mengkaji kebudayaan manusia. Barthes dalam karyanya (1957) menggunakan pengembangan teori tanda de Saussure (penanda dan petanda) sebagai upaya menjelaskan bagaimana kita dalam kehidupan bermasyarakat didominasi oleh konotasi. Konotasi adalah pengembangan segi petanda (makna atau isi suatu tanda) oleh pemakai tanda sesuai dengan sudut pandangannya. Kalau konotasi sudah menguasai masyarakat, akan menjadi mitos. Barthes mencoba menguraikan betapa kejadian-kejadian keseharian kita seperti “wajar”, padahal itu mitos belaka akibat konotasi yang menjadi tetap di masyarakat (Hoed, 2011 :5).

Semiotika, memiliki tiga wilayah kajian (Fiske, 2012 : 66) :

1. Tanda itu sendiri. Wilayah ini meliputi kajian mengenai berbagai jenis tanda yang berbeda, cara-cara berbeda dari tanda –tanda di dalam menghasilkan makna dan cara tanda-tanda tersebut berhubungan dengan orang yang menggunakannya. Tanda adalah konstruksi manusia dan hanya bisa dipahami di dalam kerangka penggunaan /konteks orang-orang yang menempatkan tanda-tanda tersebut.
2. Sistem di mana tanda-tanda diorganisasi, kajian ini melingkupi bagaimana beragam tanda telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atau budaya, atau untuk mengeksploitasi saluran-saluran komunikasi yang tersedia bagi pengiriman tanda-tanda tersebut.

3. Budaya tempat dimana tanda-tanda beroperasi. Hal ini pada gilirannya bergantung pada penggunaan dari tanda-tanda untuk eksistensi dan bentuknya sendiri.

Teori semiotik dalam penelitian ini akan fokus pada pemikiran-pemikiran Roland Barthes, pendekatan semiotik Roland Barthes secara khusus tertuju kepada sejenis tuturan yang disebutkan sebagai mitos. Menurut Barthes, bahasa membutuhkan kondisi tertentu untuk dapat menjadi mitos, yaitu yang secara semiotis dicirikan oleh hadirnya sebuah tataran signifikansi yang disebut sebagai sistem semiologis tingkat kedua, penanda-penanda berhubungan dengan petanda-petanda sedemikian sehingga menghasilkan tanda. Selanjutnya, tanda-tanda pada tataran pertama ini pada gilirannya hanya akan menjadi penanda-penanda yang berhubungan pula dengan petanda-petanda pada tataran kedua. Pada tataran signifikansi lapis kedua inilah mitos bercokol (Kris Budiman, 2011 : 38).

Lebih khusus Barthes menggunakan teori *signifiant-signifie* yang dikembangkan menjadi teori tentang metabahasa dan konotasi. Istilah *signifiant* menjadi ekspresi (E) dan *signifie* menjadi isi (C). Namun, Barthes mengatakan bahwa antara E dan C harus ada relasi tertentu, sehingga terbentuk tanda (sign). Ini suatu konsep struktural, seperti yang dikemukakan de Saussure. Namun, konsep relasi (R) ini membuat teori tentang tanda lebih mungkin berkembang, karena R ditetapkan oleh pemakai tanda. Menurut Barthes, E dapat berkembang dan membentuk tanda baru, sehingga ada lebih dari satu penanda dengan C yang sama. pengembangan ini disebut sebagai

gejala metabahasa dan membentuk apa yang disebut “kesinoniman”. Sehingga pada intinya Barthes menganut teori tentang tanda yang dikotomis atau diadik, yaitu bahwa terdiri atas dua komponen yang berbeda, tetapi berkaitan erat satu sama lain seperti dua sisi selembar kertas (Hoed, 2011 45-46).

1.2.2.2 Teori Kritis sebagai Teori Emansipatoris

Pemaparan Franz Magnis Suseno bahwa teori kritis tidak hanya mau menjelaskan, mempertimbangkan, merefleksikan, mengkategorisasikan, mengatur, melainkan mau mengubah yang mau diubah bukan filsafat melainkan pemberangusan manusia oleh hasil pekerjaannya sendiri, teori kritis mau menjadi praksis (dalam Sindhunata, 1983 : xv). Pemaparan Fransz bisa sebagai pembuka pembahasan kali ini tentang teori kritis sebagai teori emansipatoris yang berbeda dengan teori-teori yang lain.

Perkembangan teori kritis memang tidak bisa dilepaskan dari aliran Mazhab Frankfrut dengan tokoh-tokohnya seperti Horkheimer, Adorno, Marcuse sampai Habermas. Namun perkembangan teori kritis tidak bisa dilepaskan dari kritik Horkheimer terhadap teori tradisional. Horkheimer mengkritisi bahwa teori tradisional justru kenetralannya menjadi kedok pelestarian keadaan yang ada, berikutnya teori tradisional berpikir secara “ahistoris”, teori tradisional juga memisahkan antara teori dan praksis.

Berdasar kritik Horkheimer (dalam Sindhunata, 1983 : 79) terhadap teori tradisional maka menurut Horkheimer teori kritis tidak lagi berpusing dengan prinsip-prinsip umum, membangun pengetahuan yang kukuh dan tertutup pada

dirinya sendiri, seperti dilakukan teori tradisional. Dari semula Horkheimer sudah menetapkan tujuan teori kritisnya, yakni memberikan kesadaran untuk membebaskan manusia dari masyarakat irasional dan dengan demikian memberikan pula kesadaran untuk pembangunan masyarakat rasional tempat manusia dapat memuaskan semua kebutuhan dan kemampuannya .

Pendeknya, teori kritis hendak membebaskan masyarakat dari keadaan yang irasional jaman ini. Ia hendak menjadi teori emansipatoris. Horkheimer (dalam Sindhunata, 1983 : 80) yakin bahwa teori kritis bakal berhasil menjadi teori emansipatoris karena sifat dan cirinya yaitu teori kritis curiga dan kritis terhadap masyarakat, kedua teori kritis berpikir secara “historis”, ketiga teori kritis tidak memisahkan antara teori dan praksis.

Nama “teori kritis” sendiri adalah diciptakan oleh Horkheimer, kata “kritis” disini harus dimengerti dalam arti kritis terhadap ajaran-ajaran di bidang sosial yang terdapat pada saat itu (termasuk marxisme ortodoks) dan serentak juga dalam arti kritis terhadap keadaan masyarakat pada saat itu, yang sangat memerlukan perubahan radikal (Bartens, 1990 :182).

Horkheimer (dalam Bartens, 1990 : 184) menjelaskan bahwa teori kritis sendiri ingin memperjuangkan terwujudnya masyarakat yang mempunyai dasar rasional, teori ini ingin adanya emansipasi manusia dari relasi-relasi kemasyarakatan yang memperbudak, jadi tugas dan tanggungan teori kritis oleh Horkheimer dinilai sangat penting. Hanya dengan menjalankan teori kritis ini diharapkan timbulnya masyarakat yang lebih baik.

Selain itu teori kritis dapat dipandang sebagai bagian dari proses pembentukan diri yang jadi sasaran refleksinya. Dalam bentuk metodis pemahaman diri kelompok-kelompok sosial di lapangan praktis, teori ini

mencoba membangkitkan kesadaran diri kelompok-kelompok tertentu sampai kepada suatu titik di mana dia telah “mencapai tingkatan kritik dan membebaskan dirinya dari semua kepalsuan ideologis” (McCarthy, 2006 : 110).

Teori kritis juga bersifat reflektif pada dua sisi : dia sadar-diri akan asal muasal perkembangan sejarah masyarakat, dan dia-sadar diri akan perannya dalam perkembangan masyarakat lebih lanjut. Refleksifitas ganda ini membedakan teori kritis bukan hanya dari objektivisme ilmu yang eksak namun juga dari ke-cukup-diri-an (*self-sufficiency*) filsafat tradisional. Dalam pengertiannya yang ketat, teori kritis tidak dapat disebut filosofis ; karena dia tidak melahirkan klaim bagi pendasaran-diri atau realisasi-diri : “ketika logika sejarah” (McCarthy, 2006 :177).

Kemudian Ben Agger (2009 :7-9) menjabarkan bahwa teori sosial kritis harus memiliki ciri sebagai berikut :

1. Teori sosial kritis berlawanan dengan positivisme. Dia beranggapan bahwa pengetahuan bukan semata-mata refleksi atas dunia statis “di luar sana”. Namun dia adalah konstruksi aktif oleh ilmuwan dan teori yang membuat asumsi tertentu tentang dunia yang mereka pelajari sehingga tidak sepenuhnya bebas nilai. Lebih jauh teori sosial kritis berlawanan dengan pandangan positivis yang menyatakan bahwa sains harus menjelaskan hukum alam masyarakat. Sebaliknya, teori sosial kritis percaya bahwa masyarakat ditandai oleh historisitas (terus mengalami perubahan).

2. Teori sosial kritis membedakan masa lalu dan masa kini, yang secara umum ditandai oleh dominasi, eksploitasi dan penindasan. Suatu masa depan akan meluruhkan fenomena ini. Dia menghubungkan masa lalu, masa kini dan masa depan dengan berpendapat bahwa potensi bagi masa depan yang lebih baik telah ada di masa lalu dan masa kini. Dalam hal ini, teori sosial kritis mendorong kemungkinan kemajuan.
3. Teori sosial kritis berpandangan bahwa dominasi bersifat struktural. Yakni, kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi oleh institusi sosial yang lebih besar seperti politik, ekonomi, budaya, diskursus, gender dan ras. Teori sosial kritis mengungkap struktur ini untuk membantu masyarakat dalam memahami akar global dan rasional yang mereka alami.
4. Pada level ini, teori sosial kritis berkeyakinan bahwa struktur dominasi direproduksi melalui kesadaran palsu manusia, dilanggengkan oleh ideologi (Marx), reifikasi (Lukacs), hegemoni (Gramsci), pemikiran satu dimensi (Marcuse) dan metafisika keberadaan (Derrida).
5. Teori sosial kritis berkeyakinan bahwa perubahan sosial dimulai dari rumah, pada kehidupan sehari-hari manusia, misalnya seksualitas, peran keluarga dan tempat kerja. Dalam hal ini, teori sosial kritis menghindari determinisme dan mendukung voluntarisme.
6. Mengikuti pemikiran Marx, teori sosial kritis menggambarkan hubungan antara struktur dan manusia secara dialektis. Meskipun struktur mengkondisikan pengalaman sehari-hari, pengetahuan tentang struktur dapat membantu masyarakat mengubah kondisi sosialnya.

7. Dengan berfokus pada hubungan dialektis antara kehidupan sehari-hari dengan struktur, teori sosial kritis berkeyakinan bahwa manusia bertanggung jawab sepenuhnya atas kebebasan mereka sendiri serta mencegah mereka agar tidak menindas sesamanya atas nama kebebasan jangka panjang.

1.2.2.3 Teori Wacana Norman Fairclough

Teori Wacana Norman Fairclough dalam perkembangannya tidak bisa dilepaskan dari konsep wacana. Wacana sendiri secara linguistik mulai pertama dipahami sebagai satuan lingual di atas kalimat. Adapun satuan-satuan lingual di bawahnya adalah bunyi, sukukata, morfem, kata, frasa, klausa dan kalimat. Satuan kebahasaan yang disebut wacana bersifat suprasentensial. Kemudian Widdowson menjelaskan bahwa wacana adalah "*the use of sentences in combination*". Kalimat-kalimat yang menyusun sebuah wacana berhubungan satu sama lain. Tidak berdiri sendiri-sendiri secara acak (random). Kombinasi kalimat satu sama lain tidak berkaitan bukanlah sebuah wacana (dalam Putu Wijana, 2002 : 59)

Kemudian Paul Ricoeur (dalam Budiman, 2002 : 83) memandang wacana sebagai sesuatu yang berbeda dengan teks. Dalam hal ini wacana merupakan domain dari amanat-amanat lisan, sementara teks hanya terbatas pada amanat-amanat tertulis (bandingkan dengan pandangan umum yang menganggap teks adalah sama dengan naskah, sesuatu yang tertulis).

Aliah Darma (2009 :10) juga memperjelas bahwa wacana adalah proses komunikasi, yang menggunakan simbol-simbol yang berkaitan dengan interpretasi dan peristiwa-peristiwa, di dalam sistem kemasyarakatan yang luas. Melalui pendekatan wacana pesan-pesan komunikasi, seperti kata-kata, tulisan, gambar-gambar dan lain-lain, tidak bersifat netral atau steril. Eksistensinya ditentukan oleh orang-orang yang menggunakannya, konteks peristiwa yang berkenaan dengannya, situasi masyarakat luas yang melatarbelakangi keberadaannya dan lain-lain. Kesemuanya itu dapat berupa nilai-nilai, ideologi, emosi, kepentingan-kepentingan, dan lain-lain.

Melihat sisi yang lain, Haryatmoko menjelaskan bahwa pengaruh konsep “wacana” Foucault ini nampak dalam pernyataan Fairclough : Wacana membawa ke hubungan-hubungan kompleks kehidupan sosial : makna dan membuat makna. Hubungan- hubungan ini adalah dialektis. Memikirkan kekuasaan dan wacana. Kekuasaan rakyat yang mengendalikan negara modern sebagian bentuknya adalah wacana. Hal ini tergantung pada keberlangsungan legitimasi negara dan representasinya, yang sebagian besar diperoleh melalui wacana. Bahkan Fairclough mengacu ke Foucault ketika menjelaskan hubungan antara wacana, ideologi dan hubungan kekuasaan (Haryatmoko, 2015 : 160).

Lebih lanjut Wacana, menurut Fairclough, adalah praksis sosial dalam bentuk interaksi simbolis yang bisa terungkap dalam pembicaraan, tulisan, kial, gambar, diagram, film atau musik. Analisis wacana kritis tertarik pada cara bagaimana bahasa dan wacana digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial. Wacana merupakan proses semiotik dalam merepresentasikan dunia sosial. Peran wacana ini bisa dipahami karena bahasa mampu mendefinisikan dan menghasilkan objek pengetahuan (Haryatmoko, 2015 : 161).

Pemahaman ini sejalan dengan pemikiran Althusser tentang wacana yang menjelaskan wacana cenderung dipahami sebagai ideologi dalam praktik. Tak ada ideologi tanpa wacana, tak ada wacana tanpa ideologi. Setidaknya, ideologi yang tidak mewujudkan pisahkan secara material, tanpa subjek dan untuk subjek, akan kehilangan fungsinya. Lebih jauh lagi, sesuai dengan teori Marxis, wacana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formasi sosial yang ada, formasi sosial yang terbangun dari dua atau lebih kelas sosial yang saling bertentangan, terlibat dalam pertentangan dan pertarungan kelas, dengan ideologinya masing-masing (Faruk, 2002 : 142-143).

1.2.3 Kerangka Konsep

1.2.3.1 Film sebagai Teks Sosial dan Budaya

Melihat perkembangan media hiburan yang beranekan ragam serta ketergantungan masyarakat terhadap media hiburan saat ini tidak bisa dipungkiri, dan film merupakan salah satu media yang bisa merepresentasikan sekaligus menggambarkan sebuah kondisi sosial di suatu zaman tertentu. Seperti pemaparan Ratna Noviani (2011 :41) bahwa film adalah salah satu media hiburan yang semakin populer dan diminati oleh khalayak umum. Lebih dari itu, film merupakan sebuah teks sosial yang merekam sekaligus berbicara tentang dinamika kehidupan masyarakat pada saat film itu diproduksi. Bisa dikatakan citra dan naratif dari sebuah film adalah jendela yang cukup signifikan untuk melihat dan memahami realitas sosial yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu.

Pemahaman ini sejalan dengan pemikiran Althusser tentang wacana yang menjelaskan wacana cenderung dipahami sebagai ideologi dalam praktik. Tak ada ideologi tanpa wacana, tak ada wacana tanpa ideologi. Setidaknya, ideologi yang tidak mewujudkan pisahkan secara material, tanpa subjek dan untuk subjek, akan kehilangan fungsinya. Lebih jauh lagi, sesuai dengan teori Marxis, wacana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formasi sosial yang ada, formasi sosial yang terbangun dari dua atau lebih kelas sosial yang saling bertentangan, terlibat dalam pertentangan dan pertarungan kelas, dengan ideologinya masing-masing (Faruk, 2002 : 142-143).

1.2.3 Kerangka Konsep

1.2.3.1 Film sebagai Teks Sosial dan Budaya

Melihat perkembangan media hiburan yang beranekan ragam serta ketergantungan masyarakat terhadap media hiburan saat ini tidak bisa dipungkiri, dan film merupakan salah satu media yang bisa merepresentasikan sekaligus menggambarkan sebuah kondisi sosial di suatu zaman tertentu. Seperti pemaparan Ratna Noviani (2011 :41) bahwa film adalah salah satu media hiburan yang semakin populer dan diminati oleh khalayak umum. Lebih dari itu, film merupakan sebuah teks sosial yang merekam sekaligus berbicara tentang dinamika kehidupan masyarakat pada saat film itu diproduksi. Bisa dikatakan citra dan naratif dari sebuah film adalah jendela yang cukup signifikan untuk melihat dan memahami realitas sosial yang terjadi pada ruang dan waktu tertentu.

Hal ini dipertegas oleh Stuart Hall (dalam Noviani, 2011:43) bahwa media (film) adalah situs yang cukup signifikan, reproduksi maupun transformasi ideologi. Apa yang direproduksi oleh media (film) dalam hal ini merupakan jendela untuk memahami seperti apa realitas itu dan bagaimana ideologi bekerja. Film oleh karenanya, bisa berfungsi sebagai *entry point* yang penting untuk melihat dan memahami isu-isu atau perubahan-perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Film selain sebagai teks sosial dalam melihat perubahan di masyarakat juga sebagai arsip sosial yang menangkap jiwa zaman masyarakat saat itu, seorang pakar film *Siegfried Krucauer* (dalam Imanjaya. 2006 :30) menyatakan bahwa pada umumnya dapat dilihat kalau teknik isi cerita dan perkembangan film suatu bangsa hanya dapat dipahami secara utuh dalam hubungannya dengan pola psikologis aktual bangsa itu, artinya perkembangan film indonesia hanya dapat dipahami secara utuh dalam hubungannya dengan pola psikologis aktua bangsa itu. Artinya perkembangan film indonesia hanya dapat dipahami dengan baik jika perkembangan itu dilihat dalam hubungan dengan latar belakang perkembangan sosial budaya bangsa itu.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa film sangat penting dalam perkembangan suatu bangsa, hal ini dikarenakan setiap kejadian bersejarah ataupun berbagai fenomena di zaman tersebut bisa abadi dan ter-arsipkan dengan baik lewat sebuah film. Artinya perkembangan film memang harus selalu dipantau agar tidak tenggelam dan hilang.

Melihat sejarah panjangnya, maka film pertama kali berkembang di jaman Hindia Belanda, ketika itu tahun 1900, masyarakat Hindia Belanda kembali dikejutkan oleh berbagai iklan di surat kabar yang memberi tajuk “pertunjukan besar yang pertama”. Mereka menyebutnya sebagai “gambar hidup”, yang tidak lain adalah film. Pemutaran pertunjukan gambar hidup itu berlangsung pada tanggal 5 Desember 1900 (Nugroho&Herlina, 2015 : 31).

Hal ini senada dengan Subandy (2011 :191), yang menjelaskan bahwa sebagai dokumen sosial dan budaya yang mencerminkan masyarakatnya, dan sebagai corak narasi yang multitafsir, film bisa berucap banyak tentang budaya dan masyarakat yang menghasilkannya. Dengan film kita bisa mengejek, melecehkan atau bahkan dengan jujur menertawakan diri sendiri, seperti dulu saat para penonton tertawa menyaksikan film Naga Bonar (1987). Dalam konteks inilah kita menangkap “pesan moral” dari sebuah film. Kita membentangkan narasi-narasi kecil yang mungkin sekian lama terabaikan di balik dominasi wacana (*discourse*) atau narasi besar sejarah tentang diri kita, tentang sejarah kita. Kita bisa membentangkan sebuah tafsir bebas dan terbuka tentang peristiwa-peristiwa kecil tapi punya makna universal, terutama yang sekian lama ditafsirkan secara sepihak dan sewenang-wenang oleh kuasa yang terus-menerus melakukan hegemoni makna dan hegemoni tafsir atas produk budaya.

Film juga merupakan sebuah produk budaya hasil interaksi para pembuatnya. Karya itu juga berinteraksi lagi dengan masyarakat dan turut membentuk kehidupan masyarakat. Maka kebutuhan perumusan ulang agenda

kebudayaan menjadi hal penting, dimana film termasuk di dalamnya. Tanpa adanya sebuah penetapan agenda kebudayaan yang jelas, maka sesungguhnya film akan terus menjadi kegiatan gerilya dan sporadis yang tak akan mampu menyumbang optimal terhadap bangsa ini, padahal potensi film sejak dahulu selalu dianggap besar sebagai bagian dari akibat pembentukan pengalaman kolektif bangsa (Kristanto, 2007 : ix).

Azimah dan Yuyu (2015 :08) juga memaparkan bahwa komposisi yang terkandung dalam film, seperti perwatakan, kostum, properti, alur, plot dan lainnya mampu mengemas pesan ataupun ideologi dari pembuatnya sekaligus menyampaikan pandangan terhadap simbol dari sebuah fenomena secara mendalam hingga ke tahap *lifestyle*. Dalam film, *lifestyle* tampak dari cerita, perwatakan, kostum hingga properti yang dipakai dalam setiap adegan. Tidak jarang, format yang ditayangkan dalam film ini menjadi stereotype, yang tadinya hanya menggambarkan refleksi dari sebagian kecil unsur masyarakat, atau malah refleksi dari masyarakat yang secara geografis berada di luar masyarakat yang menonton film tersebut.

Lebih lanjut film sebagai salah satu bentuk media massa mempunyai peran penting di dalam sosiokultural, artistik, politik dan dunia ilmiah. Pemanfaatan film dalam usaha pembelajaran masyarakat ini sebagian didasari oleh pertimbangan bahwa film mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian orang dan sebagian lagi didasari oleh alasan bahwa film mempunyai kemampuan mengantar pesan secara unik. Melalui film, penonton diajak berpikir sejenak tentang hal-hal yang mungkin tidak terjadi dalam kehidupan

sehari-hari mereka, mengajak mereka memasuki dan mengerti budaya yang berbeda dan menambah pengalamn baik secara estetis maupun psikologis (Azimah dan Yayu, 2015 : 08).

Pada akhirnya memang film merupakan salah satu pilar bangunan estetika selain televisi dan media seni lainnya. Melalui film prinsip dan nilai estetika, teori dan keyakinan kebudayaan tampil secara utuh sekaligus memikat. Lewat film, prinsip-prinsip kebudayaan dapat dibaca dengan mudah. Lewat film pula paradigma paradigma kebudayaan ditebar keseluruh dunia. Sebagai produk budaya massa, film merangkum dalam dirinya kemampuan menjelajah setiap sudut dan ruang yang ada, menciptakan ruang estetika senin tersendiri dan menanamkan berbagai nilai dan pandangan hidup. Film adalah komoditas, seni dan sekaligus ideologi (Aginta Hidayat, 2012 : 134).

Berbagai konsep film sebagai teks sosial dan budaya, nantinya akan membantu peneliti dalam melihat dinamika wacana multikultur dalam film Indonesia. Karena dengan memahami film sebagai teks sosial dan budaya maka kita bisa melihat jauh lebih dalam tentang bagaimana dinamika multikultur dalam film nasional pasca 1998.

1.2.3.2 Masyarakat Multikultur dan Multikulturalisme

Berbicara masyarakat multikultur dan multikulturalisme maka sebaiknya mengetahui bagaimana awal mula gerakan dan masyarakat ini lahir. Multikulturalisme ini merupakan kebijakan yang pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an, merupakan suatu pergeseran signifikan

dimana identitas dikonstruksi dalam konteks modernitas barat (You Hoon, 2012 :7). Awal sejarah tersebut menunjukkan bahwa ketika pertama kali mendengar multikulturalisme maka yang terbayang adalah Amerika Serikat sebagai salah satu negara yang tergolong “sukses” menjalankannya.

Hendar Putranto (2011 : 153) juga menjelaskan bahwa Multikulturalisme pertama kali digunakan secara luas pada tahun 1970-an, pertama-tama oleh negara Kanada (1971), kemudian disusul oleh Australia (1973), sebagai bagian dari kebijakan negara untuk mendampingi dan mengelola keanekaragaman etnis yang berada di wilayah pemerintahannya. Dilihat dari konteks ini, munculnya terminologi multikulturalisme adalah sebetulnya kesadaran kolektif yang kemudian dituangkan dalam bentuk kebijakan negara (*state's policy*) atas lahirnya sejumlah konsekuensi baik sosial maupun kultural. Berikut kutipan dari salah seorang pejabat pemerintah Kanada, berkaitan dengan kebijakan multikulturalisme yang diberlakukan di negara Kanada, “Multikulturalisme yang diberlakukan di Kanada adalah sesuatu yang fundamental bagi kepercayaan kita bahwa setiap warga negara adalah ‘sama’ (equal). Multikulturalisme menjamin setiap warganegara untuk tetap dapat mempertahankan identitas mereka, berbangga atas leluhur mereka dan mempunyai ‘rasa kepemilikan yang mendalam’ (*a sense of belonging*)”.

Sementara itu, Australia mendeklarasikan diri multikultural dan memeluk paham multikulturalisme di awal 1970-an sebagai tanggapan terhadap ‘meningkatnya jumlah orang-orang Asia yang datang dan bermukim di situ (Asianization) dan kehadiran ‘para pendatang dari wilayah di luar Australia

yang tidak bisa digolongkan ke dalam tipe atau kategori tertentu (Putranto, 2011 : 154).

Kemudian Kymlica (1995 :11) memperjelas bahwa multikulturalisme itu ada karena disana ada ada perasaan keberagaman, diakuinya keberadaan minoritas dan kelompok etnis tertentu. Sehingga pada masyarakat yang multikultur toleransi itu akan ada dan muncul dengan sendirinya tanpa ada paksaan dan himbauan dari pihak manapun. Sehingga menurut Bhikhu Parekh (2008 : 15) multikulturalisme itu mengenai keberagaman atau perbedaan yang dilekatkan secara kultural. Karena memungkinkan untuk menerima jenis perbedaan lain.

Menurut Arie Setyaningum (2003 : 244) multikulturalisme sebagai sebuah ideologi memiliki dua dimensi sekaligus, yaitu dimenensi politik dan dimensi kebudayaan. Multikulturalisme sebagai sebuah dimensi politik tercermin dalam kebijakan dan peran pemerintah sebagai penyedia dan penjamin bagi distribusi keadilan sosial bagi kesetaraan akses tanpa pengecualian. Sedangkan dalam dimensi kebudayaan, multikulturalisme merupakan konstruksi sosial terhadap kesadaran untuk melihat keragaman identitas kolektif di dalam relasi sosial yang bersifat mutual serta memahami unsur-unsur yang tidak setara dalam masing-masing identitas kolektif yang memicu terjadinya konflik.

Melalui sisi yang lain Nugroho (2011 : 5) menjelaskan bahwa Multikulturalisme di satu pihak merupakan suatu paham dan dilain pihak merupakan suatu pendekatan, yang menawarkan paradigma kebudayaan untuk mengerti perbedaan-perbedaan yang selama ini ada di tengah-tengah

masyarakat kita dan di dunia. Namun, multikulturalisme bukan merupakan cara pandang yang menyamakan kebenaran-kebenaran lokal, melainkan justru mencoba membantu pihak-pihak yang saling berbeda untuk dapat membangun sikap saling menghormati satu sama lain terhadap perbedaan-perbedaan dan kemajemukan yang ada, agar tercipta perdamaian dan dengan demikian kesejahteraan dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia.

Selain pemaparan tentang multikulturalisme St Nugroho (2011 : 6) juga memaparkan lima jenis multikulturalisme, antara lain :

1. Multikulturalisme isolasionis : mengacu pada visi masyarakat sebagai tempat kelompok-kelompok budaya yang berbeda, menjalani hidup mandiri dan terlibat dalam saling interaksi minimal sebagai syarat yang niscaya untuk hidup bersama
2. Multikulturalisme akomodatif : mengacu pada visi masyarakat yang bertumpu pada satu budaya dominan, dengan penyesuaian-penyesuaian dan pengaturan yang pas untuk kebutuhan budaya minoritas.
3. Multikulturalisme mandiri : mengacu pada visi masyarakat di mana kelompok-kelompok budaya besar mencari kesetaraan dengan budaya dominan dan bertujuan menempuh hidup mandiri dalam satu kerangka politik kolektif yang dapat diterima.
4. Multikulturalisme kritis atau interaktif : merujuk pada visi masyarakat sebagai tempat kelompok-kelompok kultural kurang peduli untuk menempuh hidup mandiri dan lebih peduli dalam menciptakan satu budaya

kollektif yang mencerminkan dan mengakui perspektif mereka yang berbeda-beda.

5. Multikulturalisme kosmopolitan: mengacu pada visi masyarakat yang berusaha menerobos ikatan-ikatan kultural dan membuka peluang bagi para individu yang kini tidak terikat pada budaya khusus, secara bebas bergiat dalam eksperimen-eksperimen antarkultur dan mengembangkan satu budaya milik mereka sendiri.

Pada akhirnya Multikulturalisme sebagai sebuah kata benda mengacu pada doktrin atau paham yang berbasis pada kepercayaan akan adanya dan pentingnya menghargai sekaligus mengakui (*recognition*) keanekaragaman budaya (*cultural diversity*). Sementara itu, 'multikultural' sebagai kata sifat mengacu pada jenis masyarakat yang terdiri dari beraneka macam kelompok budaya. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai sebuah ajaran sosial yang menjadi alternatif dari kebijakan sosial yang mendahuluinya yaitu asimilasi. Multikulturalisme mensyaratkan sebuah politik pengakuan (*a politics of recognition*) atas hak-hak warganegara dan identitas kultural dari kelompok minoritas etnis yang beraneka macam, dan sebuah afirmasi atas nilai 'keanekaragaman budaya' (*cultural diversity*) (Putranto, 2011: 153).

Setelah sejarah dan pemahaman tentang multikulturalisme sudah jelas, maka berbicara masyarakat multikultur disana terdapat tiga bentuk keanekaragaman. Pertama, *keanekaragaman subkultur*, kedua *keanekaragaman perspektif* dan ketiga *keanekaragaman komunal*. Ketiga

keanekaragaman tersebut biasanya ada dalam sebuah masyarakat yang multikultur.

Istilah masyarakat multikultural dan multikulturalisme pada umumnya dipergunakan untuk merujuk pada satu masyarakat yang menunjukkan ketiga keanekaragaman seluruhnya serta keanekaragaman lainnya. Dalam masyarakat multikultural biasanya ada bentuk yang pertama atau kedua, bahkan ada ketiganya (Parekh, 2008 : 17).

Sebagai perbandingan di beberapa tempat seperti di Cina, konsep masyarakat multikultur akibat revolusi kebudayaan yang memperlemah rantai komando, melemahnya ideologi Mao dan menguatnya Deng Xioping. Dalam pemerintahan, kebijakan negara diarahkan guna memperkecil jurang perbedaan kelas dan kesenjangan ekonomi. Dengan demikian keberadaan mayoritas etnis Han tidak menjadi dominan, karena standard hidup etnis minoritas-pun ditingkatkan. Sedangkan masyarakat multikultural di Amerika dan Inggris agak berbeda dari masyarakat belahan timur. Gerakan multikulturalisme di Amerika muncul sebagai reaksi ideologis kelompok masyarakat tertindas. Perbedaan warna kulit, antara imigran keturunan Afrika dan Asia memaksa pemerintah setempat menggulirkan kebijaksanaan yang egaliter dalam mempersiapkan peluang pendidikan bagi anak-anak, penyedia lapangan kerja bagi kaum imigran dan persamaan gaji atau upah (Agus Salim, 2006 : 8).

Kemudian Setyaningrum (2003 : 245) juga melihat dalam masyarakat yang bersifat multikultural, keberagaman adalah fakta sosial, sehingga kebijakan maupun sikap moral tertentu dapat kita adopsi bagi keberagaman

budaya tersebut. Ada prinsip moralitas di dalam melihat entitas keberagaman budaya suatu bangsa yang menentukan hubungan antara individu dan kelompok yang saling berbeda serta bagaimana kita merangkai perbedaan tersebut sebagai sebuah kesatuan sosial.

Agus Salim (2006 :7) juga menjelaskan bahwa masyarakat multikultural tumbuh diawali dengan adanya kesadaran bahwa hidup manusia dalam sebuah masyarakat dan kebudayaan adalah bersifat pluralis. Disadari bahwa keberagaman yang ada merupakan fitrah dan potensi untuk saling memahami satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, dalam pelaksanaannya pendekatan multikultural memuat asumsi bahwa setiap kebudayaan dan masyarakat mempunyai cara hidupnya sendiri-sendiri yang harus dipahami dari konteks masyarakat dan kebudayaan yang bersangkutan.

Masyarakat multikultural adalah suatu konsep untuk merujuk pada perspektif hubungan sosial yang sangat beragam, yang masing-masing budaya masih memiliki sifat otonom. Dalam masyarakat multikultural, masing-masing budaya berdiri secara otonom, sehingga tampak sebagai bentuk masyarakat multi-etnis atau poli-etnis. Masyarakat multikultural dalam perkembangannya akan bersinggungan dengan konsep hidup bersama (*live together*). Untuk dapat mencapai kehidupan bersama (*living together*) dalam kesetaraan perlu dihindari bias kultural yang bersifat etnosentris, dominasi kultural dan pendekatan top down (Salim, 2006 : 12).

Namun ada beberapa pihak yang melakukan kritik terhadap multikulturalisme, seperti Ien Ang yang menyatakan bahwa kebijakan ini tidak dengan sendirinya memberdayakan kelompok minoritas. Dalam konteks realitas sosial, kendati multikulturalisme menjanjikan kesetaraan, namun hal ini tidak menjamin adanya redistribusi kekuasaan atau sumber-sumber daya. Lebih lanjut Ang mengatakan bahwa “bangsa yang multikultural”, perbedaan-perbedaan antarkelompok diklasifikasikan dengan hati-hati dan ditata ke dalam kategori-kategori “komunitas-komunitas etnis” yang mencolok secara rapi. Semuanya diatur dan ditentukan oleh kelompok hegemonik dan dominan (dalam You Hoon, 2012 : 9).

Senada dengan itu, Filosa dan Fajar (2014 : 17) menyatakan bahwa dalam masyarakat multikultur sekat-sekat itu masih ada dan terasa, dalam konteks multikulturalisme tetap ada yang namanya kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kenyataannya kelompok mayoritas tetap mempunyai kuasa atas kelompok minoritas tersebut, meskipun multikulturalisme memberikan ruang untuk minoritas berkembang namun kelompok mayoritas tetap berusaha melanggengkan kuasanya.

1.2.3.3 Hak Asasi Manusia dan Hak Kelompok Minoritas

Konsep dan penjelasan Hak Asasi Manusia (HAM) secara tidak langsung memang cukup berhubungan dan berkaitan tentang hak-hak dasar dari manusia, termasuk hak kelompok minoritas yang menjadi “jantung” dari pergerakan multikulturalisme. Pada pembahasan HAM kali ini dimulai dengan

pengertian tentang HAM, kemudian dilanjutkan dengan kritik Hanna Arendt tentang HAM, terakhir penjelasan Kymlicka tentang HAM dan kaitannya tentang hak-hak minoritas.

Istilah hak-hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *droits de l'homme* dalam bahasa Perancis yang berarti "Hak Manusia", atau dalam bahasa Inggrisnya *Human Rights*, yang dalam bahasa Belanda disebut *menselijke rechten*. Di Indonesia umumnya dipergunakan istilah : "hak-hak asasi", yang merupakan terjemahan dari *basic rights* dalam bahasa Inggrisnya dan *grondrechten* dalam bahasa Belanda. Sebagian orang menyebutnya dengan istilah hak-hak fundamental, sebagai terjemahan dari *fundamental rights* dalam bahasa Inggris dan *fundamentele rechten* dalam bahasa Belanda. Di Amerika Serikat di samping dipergunakan istilah *civil rights* (Naning, 1983 : 7).

Lebih jelasnya HAM adalah hak-hak dasar melekat sejak lahir. Hak-hak tersebut dimiliki seseorang karena ia manusia. Hak-hak tersebut berlaku bagi setiap anggota umat manusia tanpa memperhatikan faktor-faktor pemisah seperti ras, agama, warna kulit, kasta, keercayaan, jenis kelamin atau kebangsaan. Hak-hak itu bersifat supralegal : tidak bergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, mempunyai wewenang untuk bertindak lebih tinggi, dan lepas dari pemerintah, dan dimiliki manusia, bukan karena perbuatan amal dan kemurahan hati negara tetapi karena berasal dari sebuah sumber yang lebih unggul daripada hukum buatan manusia (Saleem Faruqi, 1998 : 12).

Mempertegas hal diatas, Budi Hardiman (2011 : 43) menjabarkan Semua deklarasi HAM dalam sejarah politik Barat mencantumkan *Rechtssubjekt* (subjek hukum) yang sangat umum, yaitu “manusia”, “setiap manusia”, “tak seorang pun”, atau “semua manusia”. Lepas dari perbedaan-perbedaan internal dari manusia-manusia konkret yang misalnya ditentukan oleh agama, bahasa, jenis kelamin, warna kulit, dst, manusia dari deklarasi-deklarasi HAM itu sama dan memiliki ciri-ciri dasar yang sama, sehingga karenanya juga memiliki hak-hak yang sama. “Semua manusia bebas dan dilahirkan dengan martabat dan hak-hak yang sama. Mereka memiliki akal budi dan hati nurani dan seharusnya berjumpa satu sama lain dalam semangat persaudaraan

Berbagai pemaparan dan penjelasan tentang HAM, mendapat kritik dari Hanna Arendt dalam bukunya *The Origin of Totalitarianisme* bahwa hak-hak asasi manusia banyak mengandung paradoks. Berawal dari hak fundamental itu adalah “suatu hak untuk memiliki hak-hak” (*ein Recht, Rechte Zu haben*), dan itu tak lain daripada hak yang dimiliki seseorang karena ia adalah warga suatu negara.

Hanna Arendt mempunyai dua asumsi yang menguatkan kritiknya tersebut (dalam Hardiman, 2011 :30) yaitu *Pertama*, dalam kondisi tertentu (bukan dalam segala kondisi), manusia memiliki hak-hak, sedangkan dalam kondisi lain ia tidak memiliki hak-hak itu. Asumsi ini jelas-jelas bertentangan dengan hal yang lazim dipahami, yakni bahwa hak-hak asasi manusia itu “melekat” pada kemanusiaan itu sendiri dan tidak tergantung pada kondisi manapun. Namun Arendt berpendapat bahwa ada kondisi yang membuat hak-hak itu

tidak dimiliki. Kondisi itu adalah bila seseorang dikeluarkan dari komunitas politis, yakni bila kehilangan kewarganegaraan, dan berubah menjadi *individu belaka*. Itulah kondisi yang dialami oleh para pengungsi, pencari suaka, minoritas etnis dst.

Kedua, sebagaimana setiap hak harus ada penjaminnya agar hak itu dapat dilindungi atau dilaksanakan, begitu juga hak-hak asasi manusia seharusnya dijamin. Lalu siapa penjaminnya? Jawabannya adalah kemanusiaan. Betapa abstraknya penjamin itu sehingga dapat mendekati suatu *non-sense*. Karena itu 'kemanusiaan' harus konkret dan kemanusiaan konkret itu tidak lain daripada komunitas politis atau *res publica*. Jadi, hanya jika hak-hak asasi manusia itu dijamin oleh suatu negara, hak-hak itu menjadi real dan efektif.

Persoalan HAM juga tidak bisa dilepaskan dari problematika hak-hak minoritas. Kasus yang terjadi di Yugoslavia dan Soviet merupakan contoh pemaksaan homogenisasi sehingga kelompok minoritas yang tertekan melakukan pemberontakan. Harus dipahami bahwa perkembangan masyarakat modern mengarah pada masyarakat multikultural. Meminjam istilah Clifford Geertz bahwa negara-negara di dunia saat ini berkembang menjadi sebuah 'negeri' dengan banyak 'bangsa'.

Penjelasan Kymlicka (dalam Hardiman, 2011: 77) menjelaskan teorinya tentang hak-hak minoritas, Kymlicka bertolak dari subjek hak. Tidak seperti lazimnya dalam teori-teori liberal tentang hak, subjek hak disini bukan individu, melainkan *subjek kolektif* atau kelompok. Dan ini difrensiasikan menjadi tiga, yakni disamping (1) "gerakan-gerakan sosial baru"(gerakan kaum

miskin kota, kaum cacat dan feminisme), tercakup juga (2) “minoritas-minoritas nasional” (kelompok-kelompok masyarakat yang potensial dapat memerintah diri sendiri, tetapi diintegrasikan ke dalam sebuah negara yang lebih luas, misalnya orang Puerto Rico dan Navaho di USA, orang Basque di Spanyol, dll) dan (3) kelompok-kelompok etnis (para imigran yang meninggalkan komunitas nasionalnya untuk masuk ke dalam masyarakat lain, misalnya orang Afrika, Asia, Yahudi, Islam dst di USA atau orang Turki di Jerman). Ketiga subjek itu memiliki masing-masing tiga macam hak kolektif, yakni hak-hak perwakilan khusus, hak-hak untuk memerintah sendiri dan hak-hak poli-etnis.

1.3 Metodologi Penelitian

1.3.1 Paradigma Penelitian

Melihat sebuah penelitian, maka posisi sebuah paradigma cukup penting dalam jalannya sebuah penelitian, hal ini ditegaskan oleh Ambo Upe dan Damsid (2010 :59) bahwa paradigma sebagai pandangan mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok kajian yang seharusnya dipelajari sebagai disiplin ilmu pengetahuan dan apa yang seharusnya ditanyakan; serta bagaimana jawabannya. Paradigma tersebut kemudian menjadi suatu konsensus dari komunitas ilmuwan tertentu, sehingga melahirkan berbagai subkomunitas yang berbeda. Keragaman paradigma dapat terjadi karena perbedaan filosofis. Dan konsekuensi logisnya adalah terjadi pula perbedaan dalam teori dan metodologi yang digunakan.

Kemudian diperjelas oleh Guba dan Lincoln bahwa sebuah paradigma bisa dipandang sebagai sekumpulan kepercayaan dasar (atau metafisika) yang berurusan dengan prinsip-prinsip puncak atau pertama. Paradigma mewakili pandangan dunia yang menentukan bagi pemakainya, sifat “dunia” tempat individu di dalamnya, dan rentang hubungan yang dimungkinkan dengan dunia tersebut dan bagian-bagiannya (Dalam Denzin dan Lincon, 2009 : 132)

Dalam penelitian ini peneliti berada pada paradigma kritis, paradigma kritis sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu paradigma, akan tetapi lebih tepat disebut *Ideologically Oriented inquiry*, yaitu suatu wacana atas realitas dengan muatan orientasi ideologi tertentu yakni meliputi neo-marxisme, materialisme, feminisme atau paham-paham yang setara (Salim, 2006 : 71).

Lebih lanjut Agus Salim (2006 : 86) menjelaskan bahwa teori kritis dikembangkan dari konsepsi kritis terhadap berbagai pemikiran dan pandangan yang sebelumnya. Sedikitnya, ada dua konsepsi perihal “kritis” yang perlu diklarifikasi. Pertama, ‘kritis internal’ terhadap analisis argumen dan metode yang digunakan dalam berbagai penelitian. Kritik ini difokuskan pada alasan teoritis dan prosedur dalam memilih, mengumpulkan dan menilai data empiris. Dengan demikian, aliran ini amat mementingkan pada alasan, prosedur dan bahasa yang digunakan dalam mengungkap kebenaran. Oleh karena itu, penilaian silang secara kontinyu dan pengamatan data secara intensif merupakan keunggulan dari paradigma ini. Kedua makna “kritis” dalam reformulasi masalah logika. Logika bukan semata-mata pengaturan

formal dan kriteria internal dalam pengamatan, tetapi juga melibatkan bentuk-bentuk khusus pemikiran yang difokuskan pada skeptisisme – dalam pengertian rasa ingin tahu- terhadap institusi sosial dan konsepsi tentang realitas yang berkaitan dengan ide, pemikiran dan bahasa melalui kondisi sosial historis. Dalam hal ini konsep ‘kritis’ berkaitan dengan kondisi pengaturan sosial, distribusi sumber daya yang tidak merata dan kekuasaan.

Habermas (dalam Hardiman, 2009 : 33) juga menjelaskan bahwa teori kritis sebagai suatu metodologi yang berdiri di dalam ketegangan dialiktis antara filsafat dan Ilmu pengetahuan. Dalam ketegangan itulah dimaksudkan bahwa teori kritis tidak berhenti pada fakta objektif, sebagaimana dianut oleh teori-teori positivistik. Teori kritis hendak menembus realitas sosial sebagai fakta sosiologis. Untuk menemukan kondisi yang bersifat transendental yang melampaui data empiris. Dengan kutub ilmu pengetahuan dimaksudkan bahwa teori kritis juga bersifat historis dan tidak meninggalkan data yang diberikan oleh pengalaman kontekstual. Dengan demikian teori kritis tidak jatuh pada metafisika yang melayang-layang. Teori kritis merupakan dialektika antara pengetahuan yang bersifat transdental dan yang bersifat empiris.

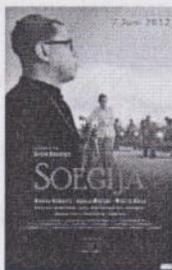
Kincheloe dan McLaren juga menjelaskan penelitian kritis dapat dipahami sebaik-baiknya dalam konteks pemberdayaan individu-individu. Penelitian yang berkeinginan untuk menyanggah gelar kritis harus dikaitkan dengan sebuah usaha untuk menentang ketidakadilan dalam suatu masyarakat tertentu atau kungkungan kekuasaan di dalam masyarakat. Lebih lanjut penelitian dalam tradisi kritis mengambil bentuk kritik kesadaran diri –

kesadaran diri dalam pengertian bahwa peneliti berusaha untuk menjadi sadar akan berbagai tuntutan ideologis dan pra anggapan epistemologis yang menjiwai penelitian mereka sekaligus klaim-klaim acuan mereka yang berciri subjektif, intersubjektif dan normatif (Dalam Denzin dan Lincoln, 2009 : 174).

1.3.2 Subjek Penelitian

Subjek Penelitian adalah benda, hal, orang, yang padanya melekat data tentang objek penelitian, oleh karena itu subjek penelitian memiliki posisi yang cukup sentral dalam penelitian karena data tentang gejala atau masalah yang diteliti berada pada subjek penelitian (Silalahi, 2012 : 250).

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Film Indonesia pasca 1998 yang mengusung tema multikultur dengan isu minoritas. Film Indonesia pasca 1998 yang dipilih peneliti adalah, antara lain Soe Hok Gie (2004), Tanda Tanya (2011), dan Soegija (2012).



Gambar 1.1 : Tiga film tema multikultur yang dianalisis dalam penelitian ini

Ketiga film ini dipilih, karena menimbulkan kontroversi dan perhatian masyarakat dengan dibuktikan banyaknya penghargaan baik lewat festival dalam maupun luar negeri. Selain lewat berbagai penghargaan tersebut, ketiga film yang peneliti pilih ini juga mendapat perhatian dari penggiat dan praktisi

film, seperti pemaparan Budi Arifianto, sutradara beberapa film dan pengajar akademi film Jogja :

“Para penikmat film Indonesia pasti tahu tanpa harus memutar ketiga film tersebut, karena ketiga film ini cukup populer dan dikenal ketika pemutarannya sedang berlangsung di bioskop-bioskop, justru kalau tidak tahu ketiga film tersebut kesannya kurang *update*” (Wawancara, 21/03/2016)

1.4.3 Metode Penelitian

1.4.3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif. Seperti diungkapkan Bogdan dan Taylor (1992 : 21-22) metode kualitatif sebagai prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dikatakan deskriptif karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka sehingga laporan penelitiannya akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan. Data-data tersebut bisa berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya.

1.4.3.2 Teknik Pengumpulan Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara mendokumentasikan beberapa film Indonesia yang bertemakan multikultur pasca 1998. Selain itu juga ada beberapa studi pustaka untuk mendapatkan data-data yang relevan. Data-data ini selanjutnya dianalisa dengan metode analisis teks yaitu analisis wacana kritis.

Hal ini seperti pemaparan Norman Fairclough bahwa semua teks yang merupakan sumber data, bisa berupa dokumen, kertas diskusi, film, televisi, pidato, kartun, foto, koran, risalah politik, pamflet, artefacts budaya seperti gambar, bangunan dan musik (Haryatmoko, 2015 : 166).

Selain data dalam bentuk teks, pada penelitian dengan analisis wacana kritis juga diperlukan wawancara terhadap kru baik sutradara ataupun kru yang terlibat dalam film yang akan dianalisis untuk mengetahui proses produksi teks yang terjadi.

Wawancara disini merupakan suatu proses tanya jawab secara fisik dengan bertatap muka antara dua orang atau lebih. Namun seiring perkembangan IT wawancara dapat pula dilakukan melalui proses telewicara via telepon atau instrumen lain (Umpo&Damsid, 2010 : 162).

1.4.3.3 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis, karena dari data yang didapat kemudian dianalisis diharapkan dapat menunjukkan antara wacana dan praktik sosial mampu memperlihatkan muatan ideologi dan ketidakadilan.

Analisis wacana kritis mempelajari tentang dominasi suatu ideologi serta ketidakadilan dijalankan dan dioperasikan melalui wacana. Fairclough (1998) mengemukakan bahwa AWK melihat wacana sebagai bentuk dan praktik sosial. Menggambarkan wacana sebagai praktik sosial menyebabkan sebuah hubungan dialektis di antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi

institusi dan struktur sosial yang membentuknya. Praktik wacana menampilkan efek ideologi (Aliah Darma, 2009 : 56).

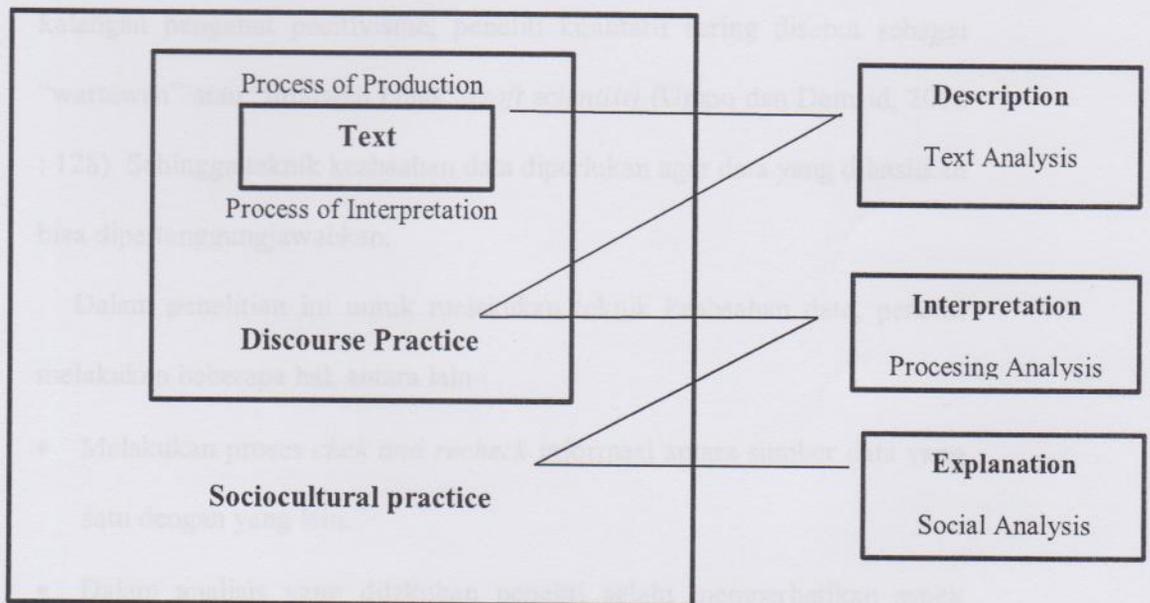
Untuk operasionalisasi pertimbangan teoritis, Fairclough mengembangkan sebuah kerangka analitis dan mengaitkannya dengan konsep interdiskursivitas (yakni kombinasi genre dan wacana yang terdapat dalam suatu teks) dan Hegemoni (keunggulan dan dominasi domain politik, ideologis dan budaya suatu masyarakat) (Fairclough 1995b:76). Fairclough menandakan tiga dimensi pada setiap peristiwa diskursif. Peristiwa diskursif secara bersama-sama adalah *teks, discourse practice dan sociocultural practice*. Analisis ini dilaksanakan dengan prinsip tiga dimensi tersebut (Wodak, dkk, 2000 : 245)

Hal ini semakin diperjelas Eriyanto (286-289) bahwa Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi: *teks, discourse practice, dan sociocultural practice*. Dalam *teks* ada tiga masalah yang dianalisis, pertama, ideasional yang merujuk pada representasi tertentu yang ingin ditampilkan dalam teks, yang umumnya membawa muatan ideologis tertentu. Analisis ini pada dasarnya ingin melihat bagaimana sesuatu ditampilkan dalam teks yang bisa jadi membawa muatan ideologis tertentu. Kedua, relasi merujuk pada analisis bagaimana konstruksi hubungan di antara wartawan dengan pembaca, seperti apakah teks disampaikan secara informal atau formal, terbuka atau tertutup. Ketiga, identitas, merujuk pada konstruksi tertentu dari identitas wartawan dan pembaca. Serta bagaimana personal dan identitas ini hendak ditampilkan.

Discourse practice merupakan dimensi yang berhubungan dengan proses produksi dan konsumsi teks. Sebuah teks berita pada dasarnya dihasilkan lewat proses produksi teks yang berbeda, seperti bagaimana pola kerja, bagan kerja dan rutinitas dalam menghasilkan berita.

Sedangkan *sociocultural practice* adalah dimensi yang berhubungan dengan konteks di luar teks. Konteks di sini memasukkan banyak hal, seperti konteks situasi, lebih luas adalah konteks dari praktik institusi dari media itu sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat atau budaya dan politik tertentu.

Gambar1.2 : Model Tiga Dimensi Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough (Fairclough, 1995 : 98)



Lebih lanjut Haryatmoko menegaskan, metode analisis wacana kritis memungkinkan penggunaan beragam cara: pertama, bisa melakukan analisa konteks, kedua, bisa menggunakan teknik pengamatan atau wawancara yang menekankan cara merekam dan menerjemahkan bahasa alamiah, ketiga, dengan model pengamatan partisipatoris yang menuntut peneliti berperan dikomunitas sehingga bisa mempelajari proses wacana. Keempat menggunakan informan atau pakar untuk menjelaskan atau menerjemahkan apa yang terjadi di komunitas dengan tetap menghormati praktik wacana yang ada: kelima, bisa menggunakan metode framing, bahkan juga bisa etnografi (2015 : 174).

1.4.3.4 Teknik Keabsahan Data

Hasil penelitian kualitatif sering dipandang tidak ilmiah. Bahkan, di kalangan penganut positivisme, peneliti kualitatif sering disebut sebagai “wartawan” atau “ilmuwan lunak” (*soft scientist*) (Umpto dan Damsid, 2010 : 128). Sehingga teknik keabsahan data diperlukan agar data yang dihasilkan bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam penelitian ini untuk melakukan teknik keabsahan data, peneliti melakukan beberapa hal, antara lain :

- Melakukan proses *chek and recheck* informasi antara sumber data yang satu dengan yang lain.
- Dalam analisis yang dilakukan peneliti selalu memperhatikan aspek konteks dari setiap bahan kajiannya. Dalam analisis wacana kritis hal ini adalah aspek makro.

- *Intertekstualitas*, adalah setiap hasil pemaknaan peneliti terhadap teks selalu dihubungkan dengan teks yang lain, sehingga hasil pemaknaan peneliti juga didukung oleh teks yang lain. Dalam analisis wacana kritis intertekstualitas masuk tataran mikro.

Barans, R. 1990. *Filsafat Barat Abad XX*. Jakarta: Gramedia

Beggs & Taylor. 1993. *Pengantar Memahami Kualitatif: Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional

Brodie, Douglas. 2005. *Multiculturalism and The Moore*. Austin: University of Texas Press

Budiman, Kris. 2002. *Membaca Malar Bersama Roland Barthes, Analisis Wacana dengan Pendekatan Semiotik: Analisis Wacana dari Linguistik sampai Dekonstruksi*. Yogyakarta: Kailash

Budiman, Kris. 2011. *Sesungguhnya Pualam*. Yogyakarta: Jajazira

Denzin, Norman K dan Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Eriyanto. 2001. *Analisis wacana*. Yogyakarta: LEIS

Fairclough, Norman. 1993. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Harlow: Pearson

Fauzi, 2002. *Konsep dan Analisis Wacana Alimatsyara: Analisis Wacana dari Linguistik sampai Dekonstruksi*. Yogyakarta: Kailash

Fiske, John. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Remaja Rosdakarya

Hardiman, Budi. 2009. *Kritik Ideologi*. Yogyakarta: Kanisius

Hardiman, Budi. 2011. *Hak-Hak Asasi manusia*. Yogyakarta: Kanisius

Heryanto, Ariel. 2013. *Identitas dan Keselamatan*. Jakarta: KPG

Hoed, Benny. 2011. *Semiotik dan Dimensi Sosial Budaya*. Depok: Komunitas Bambu

Daftar Pustaka

- Agger, Ben. 2006. *Teori Sosial Kritis*. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Aliah darma, Yoce. 2009. *Analisis wacana Kritis*. Bandung : Yrama Widya
- Barker, Chris, 2009. *Cultural Studies*, Yogyakarta : Kreasi wacana
- Bartens, K. 1990. *Filsafat Barat Abad XX*, Jakarta : Gramedia
- Bogdan & Taylor. 1992. *Pengantar Metodologi Kualitatif : Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*. Surabaya : Usaha Nasional
- Brode, Dauglas. 2005. *Multiculturalism and The Mouse*. Austin : University of Texas Press
- Budiman, kris. 2002. *Membaca Mitos Bersama Roland Barthes, Analisis Wacana dengan Pendekatan Semiotik : Analisis Wacana dari Linguistik sampai Dekonstruksi*, Yogyakarta : Kanal.
- Budiman, kris. 2011. *Semiotika Visual*. Yogyakarta : Jalasutra
- Denzin, Norman K dan Lincoln. 2009. *Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Eriyanto, 2001. *Analisis wacana*. Yogyakarta : LKIS
- Fairclough, Norman. 1995. *Critical Discourse Analysis : The Critical Study of Language*. Harlow : Pearson
- Faruk, 2002. *Konsep dan Analisis Wacana Althusserean : Analisis Wacana dari Linguistik sampai Dekonstruksi*, Yogyakarta : Kanal
- Fiske, John. 2012. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta : Raja Grafindo
- Hardiman, Budi. 2009. *Kritik Ideologi*. Yogyakarta : Kanisius
- Hardiman, Budi. 2011. *Hak-Hak Asasi manusia*. Yogyakarta : Kanisius
- Heryanto, Ariel. 2015. *Identitas dan Kenikmatan*. Jakarta : KPG
- Hoed, Benny. 2011. *Semiotik dan Dinamika Sosial Budaya*. Depok : Komunitas Bambu

- Hidayat, Agita. 2012. *Menggugat Modernisme*. Yogyakarta : Jalasutra
- Imanjaya, Ekky. 2006. *A To Z About Indonesian Film*. Bandung : Mizan
- Kymlicka, Will. 1995. *Multicultural Citizenship: A Liberal Theory of Minority Rights*. Oxford: Clarendon press
- Kristanto, JB. 2007. *Katalog Film Indonesia 1926-1997*, Jakarta : Nalar
- Littlejohn, Stephen W, 2009. *Teori Komunikasi*, Jakarta : Salemba Humanika
- McQuail, Denis, 1994. *Teori Komunikasi Massa*, Jakarta : Erlangga
- McCarthy, Thomas. 2006. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Yogyakarta : Kreasi Wacana
- Naning, Ramdlon. 1983. *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Universitas Indonesia
- Nugroho, Garin dan Dyna Herlina. 2015. *Film Indonesia*. Jakarta : Kompas
- Nugroho, St. 2011. *Multikulturalisme : Multikulturalisme, Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, Jakarta : Indeks
- Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism*. Yogyakarta : Kanisius
- Putranto, Hendar. 2011. *Wacana Multikulturalisme dilihat dari perspektif Historis-Politis : Multikulturalisme, Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, Jakarta : Indeks
- Putu Wijaya, I Dewa. 2002. *Wacana dan Pragmatik : Analisis Wacana dari Linguistik sampai Dekonstruksi*, Yogyakarta : Kanal
- Rushtom, Richard dan Gary Bettinson. 2010. *What is Film Theory*, Berkshire: Open University Press
- Reitz, Jeffry, Raymond Breton, Karen Dion, Kenneth Dion. 2009. *Multiculturalism and Social Cohesion*. Springer Press
- Saleem Faruqi, Shad. 1998. *Apakah Hak-Hak Asasi Manusia : Hak-hak Asasi Manusia dan Media*. Jakarta : Obor Indonesia
- Salim, Agus. 2006. *Stratifikasi Etnik*, Yogyakarta : Tiara Wacana

- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*.
Yogyakarta : Tiara Wacana
- Sindhunata. 1983. *Dilema Usaha Manusia Rasional*. Jakarta : Gramedia
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Refika Aditama
- Subandy Ibrahim, Idi. 2011, *Budaya Populer sebagai Komunikasi*.
Yogyakarta : Jalasutra
- Subagijo, Azimah dan Yuyu Sriwartini. 2015. *Ketika Film Layar Lebar Hadir di Televisi*. Jakarta : Grasindo
- Sukmono, Filosa dan Fajar Junaedi. 2014. *Komunikasi Multikultur*.
Yogyakarta : Litera
- Titscher, Mayer, Vetter dan Wodak. 2000. *Methods of Text and Discourse Analysis*. London : Sage Publication
- Upe, Ambe dan Damsid. *Asas-Asas Multiple Researches*.
Yogyakarta : Tiara Wacana
- You Hoon, Chang. 2012. *Identitas Tionghoa*. Yogyakarta : LP3ES

Jurnal :

- Astoria, Orizon. 2012. *Budaya Film Horor dalam Wajah Perfilman Indonesia* Jurnal Imaji Vol 4 No 1
- Faizal, R. Ahmad. 2009. *Cult Film dan Analisa Semiotik Film pada Nagabonar Jadi 2*. Jurnal Komunikasi Vol 6 No 1.
- Hammer, Yoav. 2007. *Multiculturalism and the Mass Media, Jurnal of Law and Ethics of Human Right*, Vol 1 No 169.
- Haryatmoko, 2015. *Kondisi Ideologis dan Derajat Keteramalan Analisis Wacana Kritis Norman Fairclough*, Jurnal Diskursus Vol 14 No 2.
- Kurnia, Novi. 2006. *Lambannya Pertumbuhan Industri Perfilman*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 9 No 3.
- Noviani, Ratna. 2011. *Konsep Diri Remaja Dalam Film Indonesia : Analisis Wacana Atas Film Remaja Indonesia Tahun 1970-2000-an*, Jurnal Kawistara Vol 1 No 1.
- Nala Damayanti, Maria. 2011. *Perspektif Multikultur Kasus Film 3 Hati 2 Cinta Satu Dunia*. Jurnal Visual Nirwana Vol 13 No 1.
- Putranto, Hendar. 2013. *Kesetaraan Jender dan Multikulturalisme*. Jurnal Ultima Humaniora Vol 2 No 1.
- Setyaningrum, Arie. 2003. *Multikulturalisme Sebagai Identitas Kolektif, Kebijakan Politik dan Realitas Sosial*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol 7 No 2.
- Wang, Amber Y. 2009. *Multiculturalism in the College English Curriculum*. jurnal *Multicultural, Gender and Minority Studies* Vol 3 Issue 1
- Yutanti, Widya. 2011. *Multikulturalisme dalam Wajah Komedi Situasi*. Jurnal Komunikator Vol 3 No 1.

Website :

www.filmindonesia.or.id